



ICCTF
Indonesia Climate Change Trust Fund

LAPORAN TRIWULAN 2

APRIL - JUNI 2019

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif__2

Rencana Kerja ICCTF Tahun 2019__3

Progres dan Capaian__4

Pokja I Lingkungan Hidup__5

Highlight dan Capaian Utama__5

Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi__8

Rekomendasi Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup berdasarkan Pembelajaran Proyek__19

Pokja II Energi__20

Highlight dan Capaian Utama__20

Kegiatan Kunjungan Kerja__21

Penjajakan dan Penyiapan Proyek Baru__23

Pokja III Kelautan dan Perikanan__25

COREMAP-CTI (Hibah Bank Dunia)__25

COREMAP-CTI (Hibah ADB)__27

*Blended Finance*__28

*Blue Carbon*__30

Komunikasi, *Outreach* dan Kemitraan__33

ICCTF bersama UGM Kombinasikan *Smart Farming* dan Budidaya Padi Metode SRI__34

Melihat Peluang Kerjasama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi__36

Kontribusi terhadap Film Dokumentasi *Development Channel* Bappenas__38

Partisipasi ICCTF dalam Koordinasi Mitra dan Sosialisasi Perencanaan Serta Sistem Pemantauan Restorasi Gambut di Provinsi Kalimantan Barat__39

Keuangan dan Audit__40

Lampiran__42

Ringkasan Eksekutif

Sebagai upaya pengendalian terhadap konsekuensi negatif dari perubahan iklim di Indonesia, Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) sebagai salah satu instrumen pendanaan publik di bidang perubahan iklim terus mendorong aksi mitigasi dan aksi adaptasi dalam rangka mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan meningkatkan ketahanan terhadap dampak dari perubahan iklim. Pada kuartal kedua, pelaksanaan aksi mitigasi dan aksi adaptasi yang dilaksanakan mitra pelaksana ICCTF telah memasuki fase penutupan. Melalui berbagai forum dan pertemuan konsultatif dengan berbagai pihak, ICCTF menyusun strategi keberlanjutan dan scaling up berbagai kegiatan penanganan perubahan iklim yang telah dilakukan.

Upaya replikasi dan scaling up, salah satunya dilakukan melalui kegiatan Panen Raya Padi di Desa Wuku Kalara, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan ini melibatkan *multi-stakeholder* di berbagai tingkatan termasuk Kementerian Desa PDTT dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur. Penerapan metode *System Rice of Intensification* (SRI) di Desa Wuku Kalara merupakan replikasi proyek serupa di Kupang, yang telah berhasil meningkatkan produktivitas padi hingga 200% dan menghemat kebutuhan air hingga 25%. Metode ini merupakan bagian dari penerapan konsep pertanian pintar (*smart farming*) untuk menjawab tantangan besar sektor pertanian dalam hal ketahanan dan ketersediaan pangan. Keberhasilan tersebut, telah membawa proyek ICCTF menjadi percontohan nasional penerapan metode SRI, dan kini Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Timur telah berkomitmen untuk mengarusutamakan program ke dalam rencana prioritas di tahun 2020.

Menilik keberhasilan tersebut, ICCTF melakukan eksplorasi yang lebih luas dengan menginisiasi penerapan konsep *smart farming* di lahan gambut. Lahan gambut mampu menyimpan cadangan karbon 10 kali lebih besar dari lahan mineral, sehingga memiliki peran signifikan dalam meredam lepasnya emisi GRK ke atmosfer (Balai Penelitian Tanah Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 2008).

Sebagai langkah awal, ICCTF mulai memperkenalkan konsep pertanian pintar kepada petani melalui pemasangan alat telemetri di Desa Sungai Kayu Ara, Kabupaten Siak, Riau. Data informasi iklim dan ketersediaan air dari alat telemetri ini akan menjadi bahan analisis tim ahli untuk memberikan rekomendasi tindakan pengolahan pertanian yang perlu dilakukan petani. Lokasi percontohan ini adalah salah satu desa intervensi proyek pengelolaan lahan gambut berkelanjutan dengan penerima manfaat utama adalah kelompok perempuan. Proyek, melalui kegiatan pemberdayaan kelompok perempuan telah berhasil mengembangkan diversifikasi produk bawang merah (sebagai komoditas utama yang dikembangkan pada *demonstration plot*) dalam upaya peningkatan nilai tambah.

Dalam konteks penanganan perubahan iklim di tingkat kebijakan, ICCTF juga mendukung kegiatan penandatanganan Nota Kesepahaman Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pemerintah Provinsi Papua Barat pada 18 Juni 2019 di Bappenas. Penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut merupakan salah satu upaya tindak lanjut inisiatif kebijakan Pembangunan Rendah Karbon (PRK) di Indonesia. Sebelumnya, sudah ada tiga provinsi yang berkomitmen dalam Pembangunan Rendah Karbon (PRK) ini, yakni Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Pada kesempatan ini, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menyampaikan komitmennya dengan menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca hingga 15 persen pada tahun 2020.

Pada kuartal kedua, pelaksanaan kegiatan hibah *Coral Reef Rehabilitation and Management Program – Coral Triangle Initiative* (COREMAP-CTI) yang didanai GEF melalui Bank Dunia (World Bank) secara resmi telah dinyatakan efektif. Direktur Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko, Kementerian Keuangan dan *Country Director* Bank Dunia telah menandatangani dokumen amandemen *Loan Agreement* (LA) dan *Grant Agreement* (GA) pada tanggal 19 Juni 2019. Amandemen *Grant Agreement* ini merupakan dokumen utama yang mengikat kedua belah pihak secara hukum dan berfungsi sebagai dasar implementasi program COREMAP-CTI Hibah GEF Bank Dunia oleh Kementerian PPN/Bappenas melalui ICCTF.

Rencana Kerja ICCTF Tahun 2019

Q1

JAN-MAR

- Media & Donor Visit USAID ke Sumba Timur
- Ekspo Proyek di tingkat Provinsi
- Penyusunan *Project Identification Form* untuk GEF (Topik *Sustainable Cities* dan *Biodiversity*)
- Kegiatan baru dengan pembiayaan UKCCU
- Penandatanganan *Grant Agreement* dengan WB & ADB
- Pelaksanaan COREMAP
- Rapat MWA I – 2019
- *Annual Review Project* ICCTF 2018
- Dukungan pada Peluncuran Laporan Kajian Rendah Karbon Indonesia (LCDI)
- Dukungan pada *Workshop* Konsultasi Publik KLHS
- *Programmatic Monitoring* dan *Financial Spotcheck*
- Partisipasi dalam *3rd Ministerial Conference of The Partnership for Action on Green Economy in Cape Town, South Africa*

Q2

APR-JUN

- Submit proposal baru untuk mendapatkan pendanaan ke GEF
- Penutupan proyek UKCCU (5 Proponen)
- Penutupan proyek USAID (6 Proponen)
- Peningkatan kapasitas staf ICCTF
- *Outcome Workshop* untuk penutupan proyek USAID dan UKCCU
- Dukungan Penandatanganan MOU LCDI MPPN dengan Pemprov Jabar dan Papua Barat
- *Workshop* Penyusunan *Quarterly Monitoring Report I* dan *Newsletter*
- *Programmatic Monitoring* dan Panen Raya Padi SRI di Sumba Timur
- Pelaksanaan COREMAP-CTI

Q3

JUL-SEP

- ICCTF Day
- *Kick-off* Program baru ICCTF
- *Soft skill Training* untuk staf ICCTF
- *Media & Donor Visit* UKCCU
- *Fundraising* untuk donor potensial (bilateral/multilateral)
- *Submit* proposal baru - *Renewable Energy*

Q4

OKT-DES

- UNFCCC COP-25
- *Fundraising* untuk donor potensial (bilateral/multilateral)
- *Closing Program* PMU USAID & UKCCU
- *ICCTF Annual Report 2019*
- *ICCTF Annual Work Plan 2020*
- Rapat MWA II - 2019

Komitmen ICCTF untuk terus mendukung Pemerintah Indonesia dalam penanganan perubahan iklim tertuang dalam rencana kerja tahun 2019 yang telah disepakati Majelis Wali Amanat ICCTF pada tahun lalu. Periode kuartal kedua ini berfokus untuk mempersiapkan penutupan proyek swakelola dengan pendanaan hibah UKCCU dan USAID. Sebagai salah satu *exit strategy*, ICCTF juga terus berupaya menjalin komunikasi dengan Kementerian/Lembaga melalui serangkaian pertemuan konsultatif untuk mendorong replikasi dan *scaling-up* proyek.

Pada kuartal kedua, ICCTF telah sukses menyelenggarakan kegiatan panen raya padi yang menggunakan metode *System of Rice Intensification (SRI)* di Desa Wuku Kalara, Kabupaten Sumba Timur dengan melibatkan para pemangku kepentingan diberbagai tingkatan. Kegiatan ini sebagai salah satu upaya penjangkauan publik sekaligus menjadi sarana berbagi pengalaman dan pembelajaran program. Disamping itu, ICCTF juga terus mendukung program pemerintah dalam rangka Pembangunan Rendah Karbon (PRK) melalui fasilitasi rangkaian kegiatan penandatanganan MOU Pembangunan Rendah Karbon Indonesia (*Low Carbon Development Indonesia/LCDI*) dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Provinsi Papua Barat. Dalam mendukung sekretariat ICCTF, berbagai pertemuan dan lokakarya juga telah dilakukan, diantaranya untuk mendukung penyusunan laporan dan buletin kuartal pertama, evaluasi anggaran dan sosialisasi tata cara penghapusan Barang Milik Negara (BMN).

Secara garis besar, rencana kerja pada kuartal ketiga akan berfokus pada kegiatan penggalangan dana untuk donor potensial, peningkatan kapasitas staf ICCTF, dan upaya penjangkauan publik melalui berbagai kegiatan ekspos dan *media visit*. Selain itu, ICCTF juga akan melakukan persiapan dan penutupan proyek swakelola dengan sumber pendanaan USAID dan UKCCU.



Progres & Capaian

Kelompok Kerja Lingkungan Hidup

1

Highlight dan Capaian Utama

1 Smart Farming: Praktik Terbaik dan Inisiasi Penerapan di Lahan Gambut

Dampak perubahan iklim terhadap sektor keamanan pangan di Indonesia dinilai cukup signifikan, dimana kekeringan yang terjadi telah mengubah pola tanam dan mampu mengakibatkan kegagalan panen. Pada kuartal kedua ini, ICCTF bersinergi bersama FTP-UGM mengembangkan budidaya padi dengan metode *System Rice Intensification* (SRI) yang telah berhasil meningkatkan produktivitas padi mencapai $\pm 200\%$ pada salah satu lokasi percontohan di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Keberhasilan metode ini turut mengangkat Kupang menjadi preseden bagi pelaksanaan *smart farming* di provinsi NTT. ICCTF berupaya memperluas dampak keberhasilan konsep *smart farming* ke berbagai wilayah lain, dengan mereplikasi program serupa di Wuku Kalara, Kambara, Sumba Timur.

Pada bulan April 2019, ICCTF bersama mitra pembangunan dan pemangku kepentingan di berbagai tingkatan melakukan panen raya padi SRI di Wuku Kalara. Rangkaian kegiatan panen raya ini dilakukan sebagai upaya ekspos keberhasilan penerapan metode *System of Rice Intensification* (SRI) untuk mendorong replikasi program di wilayah lain, maupun implementasi program serupa dengan skala yang lebih besar. Wakil Bupati Sumba Timur turut hadir dalam kegiatan tersebut, dan menyampaikan harapannya agar metode

SRI dapat mengurangi biaya produksi dan meningkatkan pendapatan petani.

Selain replikasi di lokasi proyek percontohan lainnya, ICCTF juga terus berupaya memperluas penerapan *smart farming* dengan melibatkan berbagai K/L teknis terkait, salah satunya adalah Kementerian Desa PDTT. Dari rangkaian diskusi dan komunikasi intensif yang terbangun, Kemendesa berencana melakukan replikasi penerapan *smart farming* di berbagai wilayah lainnya. Konsep *smart farming* yang akan diterapkan secara sederhana dapat diartikan sebagai *precision agriculture*, atau 'bertani yang lebih tepat'. Konsep ini dinilai dapat mengidentifikasi keadaan dan kebutuhan dari setiap tanaman. Dari pengidentifikasian tersebut, petani jadi lebih paham tindakan apa yang harus dilakukan pada setiap tanamannya.

Penerapan teknologi *smart farming* mulai banyak diterapkan di berbagai lahan pertanian, namun penerapannya di lahan gambut masih sangat terbatas. ICCTF menggagas penerapan metode pertanian cerdas tersebut pada salah satu lokasi proyek percontohan di lahan gambut. Karakteristik lahan gambut berbeda dengan lahan mineral baik dari sifat fisik maupun kimianya. Lahan gambut dapat



berperan sebagai penyimpan karbon, mengingat kandungan karbon yang relatif tinggi. Namun demikian, cadangan karbon dalam tanah gambut bersifat labil dan mudah terdegradasi jika kondisi alami lahan gambut mengalami perubahan. Oleh karena itu, diperlukan penanganan atau tindakan yang bersifat spesifik dalam memanfaatkan lahan gambut untuk kegiatan usaha tani.

Untuk mengidentifikasi keadaan dan kebutuhan tanaman di lahan gambut, ICCTF bersama tim ahli dan RWWG melakukan pemasangan teknologi telemetri di salah satu *demonstration plot* (demplot) di Kabupaten Siak, Riau, yang menjadi salah satu lokasi proyek percontohan ICCTF bekerjasama dengan konsorsium Riau Women Working

Group (RWWG). Telemetri merupakan salah satu *smart farming tools* yang berfungsi untuk mengidentifikasi kondisi lahan, termasuk unsur hara tanah, pH, iklim, temperatur, dan kandungan tanah. Alat ini juga mampu mendeteksi cuaca ekstrem dan memberikan rekomendasi penanganannya kepada petani melalui aplikasi *smartphone android* (aplikasi RiTx bertani).

Inisiasi penerapan konsep *smart farming* di lahan gambut diharapkan dapat meningkatkan hasil pertanian sekaligus membuka pola pikir masyarakat bahwa pemanfaatan lahan gambut secara tepat dapat menjaga ekosistem lahan gambut itu sendiri sehingga tidak mudah terdegradasi.

2 Penandatanganan Nota Kesepahaman Komitmen Implementasi Pembangunan Rendah Karbon untuk Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) antara Indonesia-Inggris

Pada tanggal 18 Juni 2019, Indonesia Climate Change Trust Fund berpartisipasi dalam penandatanganan Nota Kesepahaman Komitmen Implementasi Pembangunan Rendah Karbon untuk Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals-SDGs*) di kantor Bappenas, Jakarta. Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian PPN Bappenas dengan *Department for International Development (DfID)* dan *Foreign and Commonwealth Office (FCO)* diwakili oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, Bapak Bambang P.S. Brojonegoro dan Duta Besar Inggris, Mr. Moazzam Malik. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Inggris serta bertepatan dengan perayaan ulang tahun ke-93 Yang Mulia Ratu Elizabeth kedua.

Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia memiliki peran penting di dalam berbagai bidang mulai dari sektor ekonomi, politik, hingga perubahan iklim

dan lingkungan. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan agenda global, serta inisiatif Pembangunan Rendah Karbon Indonesia (*Low Carbon Development Indonesia-LCDI*) yang di lakukan Indonesia mendapat apresiasi terutama dalam isu lingkungan. Dalam LCDI, Pemerintah mendapat banyak bantuan dari berbagai ahli terkenal seperti dari United Kingdom dan ahli dari berbagai negara lainnya. Bapak Bambang Brodjonegoro juga mengucapkan terima kasih serta salam perpisahan kepada Duta Besar Inggris, Mr. Moazzam Malik yang akan mengakhiri masa penugasannya di Indonesia.

Pembangunan Rendah Karbon ini membutuhkan kolaborasi dan kerja keras seluruh pihak di Indonesia termasuk pemerintah daerah. Diharapkan nota kesepahaman ini juga dapat berpengaruh kepada pengentasan kemiskinan, pembangunan ekonomi berkelanjutan, kesetaraan gender dan inklusi sosial, energi yang bersih dan terjangkau,



industri, inovasi dan infrastruktur termasuk infrastruktur hijau, kota, dan komunitas berkelanjutan, serta penanganan perubahan iklim dan pendanaan hijau.

Nota kesepahaman ini mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Indonesia yang berkelanjutan dan inklusif demi kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Pembangunan Rendah Karbon menjadi *platform* komprehensif yang menjadi salah satu basis utama penentuan kebijakan pembangunan Indonesia di masa mendatang untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Pembangunan Rendah Karbon akan memperkuat koordinasi kelembagaan dan memperkuat sinergi di antara proyek-proyek kerjasama sehingga lebih efektif dan efisien

mendukung pencapaian sasaran pembangunan khususnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Pembangunan Rendah Karbon.

Pada awal Juli lalu, Inggris menetapkan komitmen untuk mencapai 0% emisi pada tahun 2050, komitmen tersebut tertuang dalam Undang-Undang Perubahan Iklim sebagai langkah besar untuk menangani dampak perubahan iklim. Duta Besar Inggris berharap langkah dan komitmen tersebut dapat menginspirasi negara lainnya. Sejak 1990 pemerintah Inggris telah berhasil mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 42% dan ekonomi Inggris bertumbuh sebesar 72%, hal tersebut merupakan pencapaian ekonomi tercepat di antara negara anggota G-20 sejak tahun 2000.

3 Penandatanganan Nota Kesepahaman Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon Provinsi Papua Barat

Indonesia Climate Change Trust Fund berpartisipasi dalam kegiatan penandatanganan Nota Kesepahaman Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pemerintahan Provinsi Papua Barat pada 18 Juni 2019 di Kantor Bappenas, Jakarta.

Penandatanganan nota kesepahaman ini diwakili oleh Bapak Dominggus Mandacan (Gubernur Papua Barat) dan Bapak Bambang P.S. Brodjonegoro (Menteri PPN/Kepala Bappenas). Sebelumnya, sudah ada tiga provinsi yang berkomitmen dalam Pembangunan Rendah Karbon (PRK) ini, yakni Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.

Papua Barat, pada tahun 2020 menargetkan penurunan emisi gas rumah sebesar 15 persen. Untuk mendukung pencapaian target tersebut, terdapat empat fokus utama dalam kerjasama PRK Provinsi Papua Barat ini di antaranya penyiapan integrasi kebijakan PRK di provinsi, penyusunan dokumen Rencana PRK Daerah, penguatan sistem online Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) PRK, serta dukungan penyiapan kegiatan PRK di Papua Barat.

Dalam pidatonya Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengingatkan bahwa Indonesia telah berjanji kepada komunitas internasional untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 29% hingga tahun 2030 melalui *Paris Agreement*. Program Pembangunan Rendah Karbon ini sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Bappenas mendorong pelaksanaan aksi penurunan emisi GRK sebagai bagian yang layak dilaksanakan untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial. Selain membahas mengenai penurunan emisi pertemuan ini juga membahas penurunan laju deforestasi hutan, peningkatan penggunaan energi terbarukan, peningkatan produktivitas pertanian

melalui intensifikasi pertanian, serta efisiensi pemanfaatan sumber daya alam dan peningkatan kualitas lingkungan.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro juga mengapresiasi kinerja Gubernur Papua Barat yang telah sangat mumpuni dalam konservasi lingkungan khususnya mengenai menjaga keanekaragaman hayati di Papua Barat. Tentunya hal tersebut harus berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, serta dengan adanya pembangunan rendah karbon ini diharapkan Papua Barat tetap mempertahankan keanekaragaman hayati dengan terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penandatanganan Pembangunan Rendah Karbon di Papua Barat ini merupakan komitmen pemerintah dan masyarakat Papua Barat agar dapat menjadi manfaat bagi seluruh masyarakat Papua. Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mengungkapkan bahwa Papua Barat telah memiliki PERDASUS (Peraturan Daerah Khusus) mengenai pelestarian hutan adat, dengan perdasus pemerintah dan masyarakat Papua Barat ikut terlibat dalam pembangunan berkelanjutan.



Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi

Pada tahun 2019, kelompok kerja (Pokja) I Lingkungan Hidup melanjutkan kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, diantaranya melalui *scaling-up* proyek-proyek yang dinilai berdampak signifikan, serta melaksanakan program tata kelola hutan dan gambut di Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Sungai Siak-Kampar di Riau dan KHG Sungai Kapuas Barito di Kalimantan Tengah.

Kegiatan penanganan perubahan iklim melalui aksi mitigasi dan adaptasi dilaksanakan melalui dana hibah USAID dan UKCCU. Pada periode triwulan II, terdapat total 3

proyek ICCTF dengan fokus area mitigasi berbasis lahan dibawah pendanaan UKCCU yang telah berakhir pada bulan Juni 2019 dengan mitra pelaksana Konsorsium YMI, Konsorsium Elang dan Konsorsium RWWG. Selama kuartal kedua, beberapa kegiatan kunjungan lapangan dalam rangka pemantauan dan evaluasi baik dari sisi program (*programmatic monitoring*) dan keuangan (*financial spotcheck*) telah dilakukan ke beberapa lokasi proyek untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan proyek dengan rencana kerja, serta sebagai upaya penyelesaian isu dan permasalahan di lapangan.

Tanggal	Pendanaan	Proponen	Lokasi	Kegiatan
4 April 2019	USAID	Yayasan Terangi	Bitung	<i>Programmatic Monitoring</i>
8 -12 April 2019	UKCCU	Konsorsium RWWG	Pekanbaru dan Siak, Riau	<i>Programmatic Monitoring</i>
8 -12 April 2019	UKCCU	Konsorsium Elang	Pekanbaru dan Siak, Riau	<i>Programmatic Monitoring</i>
14 -16 April 2019	USAID	Universitas Tanjungpura	Kalimantan Barat	<i>Programmatic Monitoring</i>
17 - 19 April 2019	USAID	FTP-UGM	Yogyakarta	<i>Financial Spotcheck</i>
19 - 20 April 2019	USAID	YAKKUM Emergency Unit (YEU)	Yogyakarta	<i>Financial Spotcheck</i>
23 - 26 April 2019	USAID	FTP-UGM	Waingapu, Sumba	<i>Programmatic Monitoring</i>
28 - 30 April 2019	USAID	Tiara Pusaka	Saparua, Ambon	<i>Programmatic Monitoring dan Financial Spotcheck</i>
28 April - 1 Mei 2019	USAID	SESAMI, YEU	Yogyakarta	Pemeriksaan BMN
29 April - 1 Mei 2019	USAID	Baileo	Maluku	Pemeriksaan BMN
16 Mei 2019	UKCCU	Konsorsium RWWG	Siak, Rlau	Pemasangan alat telemetri



Program Hibah ICCTF-UKCCU

Kunjungan Lapangan ke Proyek Mitigasi di Kabupaten Siak, Riau

Kegiatan kunjungan lapangan dilakukan secara berkala untuk meninjau capaian proyek di lapangan serta mengidentifikasi kendala dan hambatan yang dihadapi mitra pelaksana maupun masyarakat penerima manfaat dalam pelaksanaan kegiatan. Rangkaian kegiatan diawali dengan diskusi antara tim ICCTF, Konsorsium RWWG dan Konsorsium Elang membahas rencana kerja dan jadwal pelaksanaan sampai dengan akhir proyek. Mitra pelaksana menghadapi kendala perubahan cuaca yang cepat, sehingga mempengaruhi jadwal pelaksanaan kegiatan.

Tim ICCTF bersama mitra pelaksana melakukan kunjungan ke lokasi proyek di Kabupaten Siak, menempuh perjalanan darat selama 6 jam dari Kota Pekanbaru. Sebagai bagian dari kegiatan restorasi gambut, Konsorsium Elang melakukan penanaman kembali 12.000 bibit tanaman tahunan di lahan desa seluas 22 ha. Melalui penerapan proses Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan

(PADIATAPA) disepakati lokasi penanaman berada di luar dari wilayah Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) agar tidak menimbulkan konflik internal masyarakat kedepannya. Disamping meninjau lahan revegetasi, tim ICCTF juga mengunjungi 3 desa untuk memastikan sekat kanal, sumur bor, menara pantau api dan demplot agroforestri dalam kondisi yang baik dan dapat berfungsi secara optimal. Pada bulan April, masyarakat Desa Dosan menanam 8000 bibit nanas setelah sebelumnya melakukan panen 60 kg cabai dari 2000 bibit yang ditanam. Tanaman cabai dinilai memiliki hasil yang kurang optimal, sehingga masyarakat sepakat untuk menanam nanas di demplot seluas 1350 m². Berdasarkan keterangan masyarakat, harga nanas saat itu berkisar pada Rp 2.400-3.500/buah. Masyarakat menambahkan, bahwa biaya awal yang dikeluarkan untuk membeli bibit nanas adalah seharga Rp 500/bibit serta terdapat biaya pemeliharaan seperti pupuk dan pembusukan sisa tanaman paska panen.





Kawasan ekowisata mangrove yang dibangun kelompok masyarakat di Desa Sungai Kayu Ara dengan pendampingan dari Konsorsium RWWG telah melalui kemajuan cukup signifikan. Fasilitas kamar mandi ramah difabel sudah dapat berfungsi dengan baik, serta pembangunan *mangrove track* sepanjang 250 meter dan 2 gazebo telah diselesaikan. Beberapa fasilitas pendukung lainnya seperti tempat sampah, papan penanda, komponen edukasi dan



lokasi parkir masih perlu ditambahkan untuk memberi nilai tambah terhadap kawasan ekowisata. ICCTF berharap dengan adanya kawasan ekowisata yang terbangun, mampu meningkatkan pendapatan masyarakat lokal sekaligus membangun kesadaran pengunjung untuk menjaga lahan gambut sebagai muatan yang diangkat dalam ragam edukasi di lokasi ekowisata.



Kelompok Masyarakat Peduli Api atau disebut MPA tengah mengerjakan penimbunan kanal sepanjang 1 km di titik kanal dengan jarak penimbunan 50 meter pada masing-masing sisi. Lokasi penimbunan berada di Desa Sungai Kayu Ara dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut merupakan



lahan rawan kebakaran pada tahun 2014-2015. Penimbunan kanal merupakan salah satu upaya pembasahan kembali (*rewetting*) lahan gambut yang mengering akibat turunnya muka air tanah gambut, sehingga diharapkan dapat mencegah terjadinya kebakaran.



Inisiasi Penerapan *Smart Farming* di Lahan Gambut

Gagasan penerapan konsep *smart farming* di lahan gambut bermula dari keberhasilan proyek ICCTF di Kupang, Nusa Tenggara Timur yang sukses meningkatkan produktivitas padi hampir 200% dengan bantuan teknologi telemetri yang dipasang di lahan seluas 28 ha. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah juga berupaya untuk terus mengembangkan konsep *smart farming* di berbagai daerah percontohan sebagai langkah awal memperkenalkan teknologi pertanian pintar presisi (*Precision Agriculture*). Konsep *smart farming* dikenal sebagai teknologi pertanian modern yang mulai diperkenalkan secara luas untuk meningkatkan efisiensi dan produksi pertanian. Namun demikian, penerapan konsep pertanian pintar di lahan gambut masih sangat terbatas, dimana sebagian besar lokasi percontohan berada di lahan mineral. Sebagai langkah awal, ICCTF menjadi pionir dalam menerapkan konsep *smart farming* melalui pemasangan alat telemetri di salah satu demplot agroforestri di lahan gambut yang juga menjadi lokasi proyek percontohan

ICCTF di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Upaya ini juga turut menjawab tantangan pemanfaatan lahan gambut yang selama ini dinilai tidak produktif sebagai lahan pertanian.

Demplot agroforestri ini sebelumnya telah dinilai berhasil mengembangkan pertanian hortikultura, dengan hasil pertanian utama adalah bawang merah. Salah satu mitra pelaksana, Konsorsium Riau Women Working Group (RWWG), secara intensif melakukan pendampingan kepada kelompok wanita untuk budidaya tanaman bawang merah. Untuk menciptakan nilai tambah, kelompok perempuan juga dilatih untuk mengolah bawang merah menjadi berbagai produk seperti kue kering, makanan ringan dan bawang goreng. Pemasaran produk dilakukan tidak hanya melalui berbagai *showcase* dan pameran, namun juga melalui digital marketing pada laman resmi Produk Inovasi Gambut (www.prigi.id).

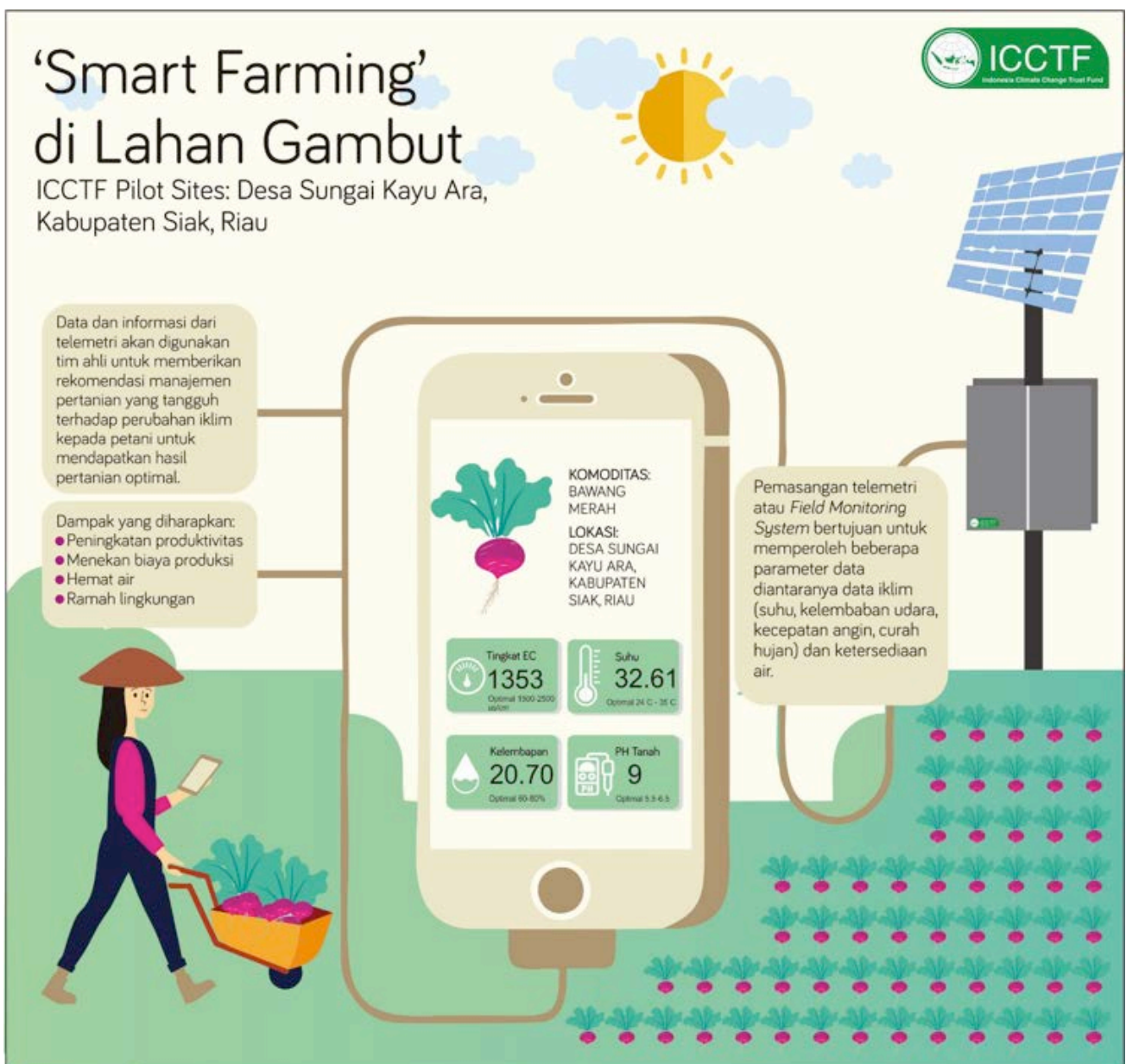
Pemasangan alat telemetri pertama dilakukan pada bulan April, bersama dengan tim ahli, ICCTF, Konsorsium RWWG dan kelompok perempuan di Desa Sungai Kayu Ara. Telemetri atau *Field Monitoring System* digunakan untuk mengukur kondisi iklim secara *real time*. Penggunaan teknologi ini menjadi bagian dari *smart agriculture*, dimana

air dan pupuk yang digunakan menjadi lebih hemat sesuai kondisi lahan sekaligus meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Harapannya, masyarakat penerima manfaat di kemudian hari dapat melakukan transfer pengetahuan ke masyarakat lain disekitarnya, dan secara bertahap konsep pertanian pintar dapat diterapkan secara lebih luas.



Telemetri yang dipasang di demplot berfungsi untuk mengidentifikasi kondisi tanah, termasuk unsur hara, pH, cuaca, temperatur dan kandungan air tanah. Data kondisi tanah dan cuaca secara otomatis akan di-*update* setiap 5 menit ke server data dan terkoneksi langsung melalui aplikasi *smartphone android* (RiTx Bertani), termasuk rekomendasi yang perlu dilakukan petani apabila terjadi kondisi ekstrem melanda lokasi penanaman. Setelah alat telemetri terpasang, kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi cara pengoperasian

alat kepada kelompok perempuan yang mengelola demplot tersebut. Dalam kegiatan sosialisasi dan diskusi tersebut, turut hadir perwakilan kelompok tani dari desa lainnya yang menyatakan ketertarikannya untuk menerapkan konsep serupa di wilayahnya. Tim ICCTF berencana melakukan audiensi ke Pemerintah Daerah Kabupaten Siak untuk menyampaikan konsep *smart farming* dan penggunaan alat telemetri di lahan gambut.



Ringkasan Kemajuan Mitra Pelaksana ICCTF-UKCCU Triwulan II 2019

Mitra Pelaksana	Lokasi	Kemajuan
Konsorsium Mitra Insani	Riau	<ul style="list-style-type: none"> Penyelesaian dokumen SID dan DED untuk pembangunan infrastruktur <i>rewetting</i>. Pembangunan 2 tower pemantau api di Desa Rawa Mekar Jaya dan Desa Pulau Muda. Pelaksanaan PLTB di 3 demplot. Penanaman 6.000 bibit di Desa Teluk Lanus. Penyelesaian dokumen laporan studi pengurangan emisi dan sosial ekonomi.
Konsorsium RWWG	Riau	<ul style="list-style-type: none"> Pemasangan alat telemetri di demplot bawang merah Desa Sungai Kayu Ara. Penimbunan kanal (<i>backfilling</i>) sepanjang 1 km. <i>Joint monitoring</i> bersama SKPD (Dinas Perindustrian dan perdagangan Siak, BPBD, BAPPEDA, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, Manggala Agni).
Konsorsium Perkumpulan Elang	Riau	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi karhutla bersama Managgala Agni. Pembangunan tower pemantau api di Desa Sungai Limau. Penanaman kembali 12.000 bibit di lahan seluas 22 ha. Dokumen kajian penurunan emisi GRK di 6 desa intervensi. FGD penyusunan SOP dan EWS.
P2KLH	Kalimantan Tengah	<ul style="list-style-type: none"> Survei awal lokasi penimbunan kanal. Survei lokasi kegiatan agroforestri di Desa Lamunti dan Pulau Kaladan. Koordinasi dengan KPH Kapuas untuk pelaksanaan kegiatan agroforestri.

Capaian Dalam Angka

Pendanaan UKCCU Batch II sampai dengan Kuartal II 2019

Studi <i>baseline</i> ekosistem gambut	4
Studi <i>baseline</i> kondisi ekonomi	5
Rencana Aksi Provinsi	4
Desa Menerapkan Prosedur Restorasi dan <i>Rewetting</i>	27
Sekat kanal	131
Sumur bor	438
Penimbunan kanal	5 km
Tower pemantau api	4
Pohon ditanam	102.050
Revegetasi/Penanaman kembali	104 ha
Demplot agroforestri	13,5 ha
Kawasan ekowisata	3
Kelompok MPA	17
Diseminasi pencegahan kebakaran	324 anggota
SOP penanganan kebakaran tersusun	9
<i>Early Warning System</i>	3



Program Hibah ICCTF-USAID

Kunjungan Lapangan ke Proyek Adaptasi di Pulau Bitung, Sulawesi Utara

Perjalanan menuju Kota Bitung dari Kota Manado ditempuh selama 2 jam melalui perjalanan darat dan 1 jam melalui laut untuk mengunjungi proyek pengembangan ketangguhan masyarakat Pulau Lembeh dan Pantai Likupang dalam menghadapi bencana alam dan perubahan iklim. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dalam proyek ini adalah kegiatan sosialisasi dan internalisasi dari hasil – hasil proyek yang dikembangkan oleh Yayasan TERANGI selaku mitra pelaksana ICCTF. Acara tersebut dihadiri oleh pemerintah daerah Kota Bitung beserta lembaga – lembaga pemerintahan lainnya, ICCTF, Yayasan TERANGI, masyarakat pelaku proyek, serta masyarakat umum. Salah satu pencapaian penting dari kegiatan ini adalah peta kerentanan yang dikembangkan oleh Yayasan TERANGI dengan menganalisis dan mengembangkan model spasial kerentanan, diterima dan akan digunakan oleh pemerintah daerah serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bitung untuk pemutakhiran dari peta kerentanan sebelumnya dan basis data perencanaan penanggulangan kebencanaan.

Selain itu, tim ICCTF juga mengunjungi dan berdiskusi dengan pemerintah desa, kelompok sadar wisata (pokdarwis), aktivis lingkungan Pulau Lembeh yang tengah mengembangkan sektor wisata alam di daerah mereka. Beberapa atraksi wisata yang dikembangkan di Pulau Bitung adalah beberapa lokasi wisata penyelaman terumbu karang, wisata hutan, wisata dermaga, dan wisata hutan mangrove. Akan tetapi dalam proses pengembangannya, terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh masyarakat seperti permasalahan sampah, infrastruktur, dan peningkatan SDM.

Secara keseluruhan, hasil kajian dan intervensi proyek ICCTF-Terangi menjadi penting dengan adanya kedekatan antara perairan Pulau Lembeh dan Kota Bitung dengan kawasan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung. Kekhawatiran akan dampak dari bencana alam dan perubahan iklim telah diantisipasi dengan adanya peningkatan SDM masyarakat dan Pemkot Bitung.





Pemantauan Lapangan Proyek Mitigasi Berbasis Lahan di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat

Proyek pengelolaan gambut di Kabupaten Mempawah bekerjasama dengan Universitas Tanjungpura sebagai mitra pelaksana, dilaksanakan di 11 desa baik di dalam maupun disekitar KHDTK Untan. Dari berbagai rangkaian kegiatan dan diskusi mitra pelaksana dengan masyarakat, teridentifikasi adanya potensi untuk membangun desa wisata di Desa Kayu Ara, Kabupaten Landak yang memiliki komoditi madu kelulut dan rumput fatimah sebagai produk budidaya Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).

Salah satu desa di Kabupaten Mempawah, Desa Peniti sedang dalam proses mengembangkan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang diolah dari air gambut yang melibatkan kerjasama berbagai pihak. Pemerintah Desa

mendukung upaya tersebut dengan menyediakan rumah dan operasional bagi pengembangan AMDK. Kepala desa juga telah mengeluarkan SK untuk pengembangan AMDK melalui Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum (KPSPAM). Tim UNTAN berkontribusi melalui fasilitasi teknologi AMDK baik dari segi pemasaran (model bisnis) dan pemeliharaannya. Pihak swasta, turut mendukung pengembangan proyek di sektor pertanian seperti PT. MSL yang akan memfasilitasi demplot budidaya jagung di 5 titik seluas masing-masing 2.000 m² dan penyuluhan berkala. Dari hasil kunjungan, tim ICCTF bersama mitra pelaksana, masyarakat dan PT. MSL sepakat untuk menindaklanjuti kerjasama pengembangan budidaya jagung tersebut.





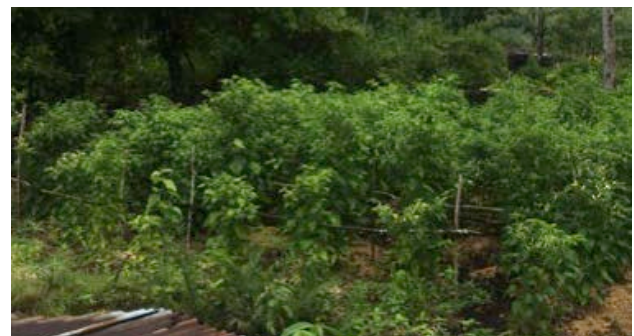
Kunjungan Lapangan ke Proyek Adaptasi di Saparua, Ambon

Perjalanan menuju Pulau Saparua dari Kota Ambon ditempuh selama 3 jam melalui perjalanan laut untuk mengunjungi kegiatan pertanian organik. Sebagai salah satu strategi adaptasi, Yayasan Tiara Pusaka selaku mitra pelaksana memperluas penggunaan pupuk dan pestisida organik dengan memanfaatkan bahan lokal. Selama program berjalan, para petani mengakui bahwa pestisida organik hasil penggabungan dua formula dari Universitas Pattimura dan Yayasan Tiara Pustaka memiliki hasil yang lebih baik.

Mitra pelaksana bersama dengan salah satu Pasar Buah dan Sayuran (*fresh market*) di Kota Ambon menyepakati kerjasama dengan petani organik di Pulau Saparua. Bentuk kerjasama tersebut diawali dengan rencana pelatihan kepada petani untuk mencapai standar produk dari hasil penanaman sesuai dengan kebutuhan pasar. Para petani juga bermaksud membentuk koperasi jaringan petani organik bekerjasama

dengan Dinas Koperasi dan UKM setempat.

Hasil produk pertanian organik saat ini masih dijual disekitar Pulau Saparua, dimana tidak terdapat perbedaan harga yang signifikan antara produk organik dan non-organik. Oleh karena itu, ICCTF terus mendorong adanya upaya perluasan pemasaran agar dapat memberikan nilai tambah bagi produk-produk organik. Salah satu petani di Pulau Saparua menyatakan hasil penjualan dari panen sakata di lahan seluas $\pm 300 \text{ m}^2$ mencapai Rp 4 juta selama 3 bulan masa tanam, dengan biaya pemeliharaan senilai Rp 1 juta untuk bibit, pupuk dan pestisida. Untuk menjaga keberlanjutan kegiatan ini, diharapkan desa intervensi di Pulau Saparua dapat mengajukan beragam kegiatan pertanian organik ke dalam program inovasi desa yang diinisiasi oleh Kementerian Desa PDTT.



Ringkasan Kemajuan Mitra Pelaksana ICCTF-USAID Triwulan II 2019

Mitra Pelaksana	Lokasi	Kemajuan
Universitas Tanjungpura (UNTAN)	Kalimantan Barat	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi potensi desa wisata di Desa Kayu Ara, Kabupaten Landak. Proses pengembangan Air Minum Dalam Kemasan berbahan baku air gambut. Kerjasama dengan PT. MSL untuk fasilitasi demplot budidaya jagung.
Fakultas Teknologi Pertanian UGM (FTP UGM)	Sumba Timur	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan panen raya dan diseminasi di Desa Wuku Kalara, Sumba Timur. Hasil panen padi dengan metode SRI naik lebih dari 200% dibandingkan dengan panen musim tanam 1. Perhitungan nilai emisi GRK di lahan konvensional dan sistem SRI.
Yayasan Terangi	Pulau Lembeh dan Pantai Likupang	<ul style="list-style-type: none"> Lokakarya Sekolah Pantai Indonesia melibatkan 28 orang. <i>Workshop</i> Wisata Selam dengan melibatkan sebanyak 11 orang.
Yayasan Orang Utan (YAYORIN)	Kalimantan Tengah	<ul style="list-style-type: none"> Penanaman 18.000 bibit pohon kayu dan buah hutan rawa gambut di lahan seluas 200 ha. Pengambilan data untuk analisis pengukuran emisi karbon oleh konsultan GAIA. Operasional pengemasan dan distribusi produk ke pasar dan Hypermart. Patroli pengawasan karhutla dan membangun pos pengawasan. Penerapan PLTB di lahan padi seluas 25 ha.
Yayasan Tiara Pusaka	Saparua, Ambon	<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan pembuatan pestisida organik kepada petani. Penjajakan kerjasama dengan fresh market di Ambon. Inisiatif kerjasama dengan Dinas Koperasi dan UKM untuk pengembangan koperasi jaringan petani organik.
Lembaga Olah Hidup (LOH)	Sumbawa	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen perhitungan baseline karbon telah disampaikan ke sekretariat ICCTF. Dokumen zonasi penanaman akan disampaikan bersama dengan laporan akhir proyek. Penanaman bibit tanaman sela pada lahan seluas 450 ha (70% hidup). Penanaman 30.000 bibit mangrove di 3 desa dengan total luasan 75 ha (70% hidup). Penebaran 6.500 benih bandeng di beberapa petak tambak.

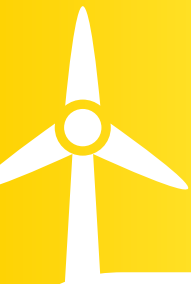
Capaian Dalam Angka

Pendanaan USAID Batch III pada Kuartal II 2019

Peningkatan produktivitas padi (ton/ha)	4.3
Buku Panduan/analisis (unit)	3
Panen raya padi/hortikultura/jagung/ikan (kali)	4
Rekomendasi Kebijakan (satuan)	4
Kebijakan Terimplementasi (satuan)	3
Kelompok Masyarakat (Tani/Budidaya Ikan/Budidaya HHBK/Wisata/Pengembang Air Minum Gambut/Masyarakat Peduli Api) (unit)	47
Tambak Bandeng (ha)	15
Sekolah Terlibat (unit)	2
Expose Wisata	1
Sumur bor (satuan)	10
Peralatan pendukung program (paket)	25
Demplot budidaya lebah kelulut (unit)	1
Pos Pengaman (unit)	1
Menara Pemantau (unit)	1
Penanaman PLTB (ha)	2
Area bebas bakar/terintegrasi oleh praktek PLTB (unit)	5
Jenis bibit (unit)	14

Rekomendasi Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup berdasarkan Pembelajaran Proyek

1. Keberhasilan pemanfaatan air gambut menjadi air minum di Kalbar, memberi harapan kemandirian penyediaan air bersih di tingkat desa. Hal ini sebaiknya menjadi kebijakan lintas sektor (PUPR-Kesehatan).
2. Keberhasilan budidaya jagung dan bawang merah di gambut (Riau-Kalbar) perlu dikaji mendalam secara lingkungan (Badan riset-Perguruan Tinggi).
3. Keberhasilan budidaya jagung dengan pupuk, insektisida dan herbisida organik di Sumbawa diharapkan segera direplikasi menjadi kebijakan di sentra produksi pertanian.
4. Pengelolaan hutan berbasis HKM, dengan sistem perhutanan sosial meningkatkan peran serta masyarakat dan menurunkan konflik pengelolaan. Tingkat keberlanjutannya akan sangat baik saat dipadu dengan wisata dan usaha produktif. Hal ini memicu kemandirian masyarakat dalam mengelola lingkungan. Hal ini sebaiknya menjadi kebijakan lintas sektor (Kehutanan-Kemendesa PDPT-Pariwisata-Ekraf).
5. Pertanian presisi (*Smart Farming 4.0*) dapat segera dipadu dengan *smart water distribution* yang akan meningkatkan efisiensi air waduk dan produktifitas pertanian. Hal ini sebaiknya menjadi kebijakan lintas sektor (Pertanian-PUPR).
6. Pengolahan limbah ternak besar dengan *biodigester* menjadi biogas dan pupuk organik sangat berperan dalam penurunan emisi, sekaligus meningkatkan kualitas tanah. Hal ini sebaiknya menjadi kebijakan lintas sektor (Pertanian-ESDM).
7. Pengolahan limbah pertanian menjadi pakan ternak fermentasi berupa silase mengurangi emisi limbah pertanian, dan menurunkan biaya produksi.
8. Pembangunan sekat kanal untuk mempertahankan kedalaman air 40 cm, menjadi bagian perbaikan ekosistem gambut yang perlu disebarluaskan ke level desa-desa gambut.



Kelompok Kerja Energi

2

Highlight dan Capaian Utama

1 Tindak Lanjut Kerja Sama dengan European Investment Bank (EIB)

Pokja II-Energi telah melakukan koordinasi dengan beberapa lembaga milik pemerintah mengenai peluang menjadi *channeling entity* dalam rangka kerja sama dengan EIB, poin-poin utama hasil dari rangkaian pertemuan dengan beberapa lembaga adalah sebagai berikut:

- a. Bank BNI telah menyampaikan kesediaannya menjadi *channeling entity* dalam rangka kerja sama dengan EIB. BNI juga telah menyampaikan daftar proyek yang akan dimasukkan dalam proposal pendanaan kepada EIB. Dalam rencana skema kerja sama antara BNI dan EIB, BNI akan berperan sebagai *borrower* kepada EIB. BNI selanjutnya akan meminjamkan dana tersebut (*two step loan*) sesuai dengan proposal pendanaan proyek dari para pengembang. Selain itu, BNI memerlukan fasilitas jaminan pinjaman dari pemerintah (*sovereign guarantee*) mengingat BNI bukan merupakan badan usaha yang 100 persen dimiliki oleh negara.
- b. Pokja II-Energi telah melakukan koordinasi dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) untuk

memberikan fasilitas jaminan pinjaman dari pemerintah kepada badan usaha milik negara. Akan tetapi, sesuai dengan regulasi yang berlaku, PII tidak dapat menyediakan fasilitas jaminan pinjaman tersebut mengingat skema *two step loan* yang ditawarkan oleh BNI tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku saat ini. Peluang kerja sama antara BNI dengan EIB akan diupayakan melalui skema *Business-to-Business (B2B)* dengan mencoba mengusulkan proyek rintisan (*pilot project*).

- c. Pokja II-Energi juga sedang melakukan peninjauan dengan Pertamina Geothermal Energy (PGE) untuk menjadi *borrower* dalam kerja sama dengan EIB. PGE telah menyampaikan surat yang menyatakan ketertarikannya pada fasilitas pendanaan dari EIB untuk proyek panas bumi skala kecil (*small scale*) di Indonesia. Saat ini PGE sedang melakukan penyusunan proposal berupa daftar proyek panas bumi skala kecil yang akan diusulkan kepada EIB.

2 Penandatanganan *Non Disclosure Agreement (NDA)* dengan Global Green Growth Institute (GGGI) dan Kaltimex Energy

Penandatanganan NDA antara Pokja II-Energi, GGGI dan Kaltimex Energy merupakan tindak lanjut rencana pembangunan PLT Sampah di Luwuk, Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Melalui penandatanganan NDA tersebut, Pokja II-Energi dan GGGI berkomitmen membantu penguatan kualitas dokumen studi kelayakan PLT Sampah tersebut. Saat ini, GGGI telah tengah memberikan *technical assistance* untuk melakukan reviu dan penajaman terhadap dokumen studi kelayakan yang sudah disusun oleh Kaltimex Energy.

Dalam waktu dekat, tim dari Pokja II-Energi, GGGI dan Kaltimex Energy akan melakukan kunjungan kerja ke lokasi pembangunan PLT Sampah di Luwuk tersebut. Adapun tujuan dari kunjungan tersebut adalah untuk melakukan pengumpulan data dan meninjau langsung lokasi tersebut. Hasil reviu penguatan kualitas dokumen studi kelayakan PLT Sampah di Luwuk, Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah ditargetkan akan selesai pada bulan September 2019.

3 Tindak Lanjut Kerja Sama dengan Shizen Energy Jepang

Kerja sama antara Pokja II-Energi dengan Shizen Energy Jepang telah memasuki tahap pemilihan proyek. Hasil reviu penajaman pada 2 (dua) proyek PLTS yang disediakan oleh Pokja II-Energi, Shizen Energy tertarik untuk berinvestasi pada proyek PLTS di Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Saat ini Shizen Energy telah melakukan *drafting*

Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT Sinarmas untuk investasi PLTS di Tanjung Jabung Timur. Selanjutnya, Shizen Energy, PT Sinarmas dan PT Puriver sebagai pengembang akan melakukan kerja sama untuk pembangunan PLTS di Tanjung Jabung Timur, Jambi.

4 Tindak Lanjut Kerja Sama Pembangunan PLT Sampah di Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Timur (NTT)

Pada saat ini, Pokja II-Energi akan memberikan fasilitasi terhadap badan usaha milik pemerintah, dalam hal dengan PT. PP Energi dalam mengembangkan 2 (dua) *demo-plant* PLTSa di Kawasan Nusa Dua, Bali dan di Kabupaten Bangli serta 1 (satu) PLTBm yang terintegrasi dengan Kawasan Geopark Batur di Kabupaten Bangli.

Dalam rangka menindaklanjuti hal tersebut, maka diperlukan dukungan bantuan teknis GGGI kepada Pokja II-Energi

dalam bentuk *technical assistance pre-feasibility study* pada ketiga proyek tersebut di atas. Hal tersebut sejalan dengan salah satu mandat yang diberikan kepada Program Pertumbuhan Ekonomi Hijau (*Green Growth Program*) Fase ke-2 adalah memfasilitasi pengembang proyek dalam meningkatkan kualitas dokumen perencanaan proyek dan mengakses pendanaan.

Kegiatan Kunjungan Kerja

Kunjungan Kerja ke Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT)

Pada tanggal 25 April 2019, tim dari Pokja II-Energi bersama dengan perwakilan Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan Bappenas dan juga tim USAID-ICED mengadakan kunjungan ke Pulau Sumba, NTT. Kunjungan kerja tersebut dipimpin oleh Bapak Nizhar Marizi, Kepala Subdirektorat Pengembangan dan Konservasi Energi, Bappenas. Kunjungan kerja bertujuan untuk meninjau pengelolaan PLTS Sumba kapasitas 1 MW dan pembangunan *Solar Photovoltaic (Solar PV)* di sekolah dasar (SD) melalui implementasi Program TERANG dari HIVOS. Berikut hasil kunjungan tersebut:

- a. Kunjungan pertama yaitu meninjau PLTS Hambapraing di Kabupaten Sumba Timur. PLTS tersebut merupakan PLTS terbesar di Pulau Sumba dengan kapasitas 1 MW. PLTS Hambapraing mulai konstruksi pada tahun 2016 dan beroperasi sejak Februari 2017. Adapun PLTS tersebut dioperasikan oleh PT Buana Energi Surya Persada bekerja sama dengan Bank BRI dengan skema pendanaan 60-40 dengan total investasi mencapai USD 2,2 juta (Rp 28 miliar).



Diskusi Bersama PT Buana Energi Surya Persada selaku Pengembang PLTS Hambapraing.

Kendala utama pengelolaan PLTS Hambapraing adalah kondisi cuaca. Ketika cuaca berawan atau hujan, PLTS Hambapraing hanya mampu bekerja dibawah 50 persen. Bahkan jika cuaca buruk, 10-15 unit dari total 30 unit inverter PLTS tersebut harus dimatikan.

Hal ini kemudian berpengaruh pada sistem PLN yang harus segera mengaktifkan pembangkit pengganti (*back up*). Adapun sistem pelaporan kondisi cuaca dari petugas PLTS ke PLN masih dilakukan secara manual sehingga membutuhkan waktu penyesuaian sistem oleh PLN. Tim USAID-ICED II kemudian menyampaikan

bahwa kedepannya akan dilakukan pengembangan sistem online pelaporan kondisi cuaca di sekitar PLTS Hambapraing. Hal ini untuk memudahkan proses koordinasi penyesuaian sistem *intermittent* dengan PT PLN.



PLTS Hambapraing di Kabupaten Sumba Timur dengan Kapasitas 1 MW.

- b. Kunjungan berikutnya yaitu meninjau implementasi Program TERANG dari HIVOS. Implementasi program tersebut berupa pemasangan Solar PV di beberapa Sekolah Dasar (SD) dan pembagian lampu kepada para pelajar di sekolah tersebut. Salah satu sekolah dasar yang mendapatkan solar PV adalah Sekolah Dasar Masehi (SDM) Mbatakapidu Kabupaten Sumba Timur yang sebelumnya belum memiliki akses listrik.

Melalui Proyek TERANG kerja sama antara HIVOS dan Millennium Challenge Account-Indonesia (MCA-I), Yayasan Rumah Energi dan juga Village Infrastructure Angel telah dilakukan pembangunan Solar PV dan pembagian lampu kepada para pelajar. Saat ini terdapat 1 unit solar panel dengan kapasitas sebesar 150 kw, *charger point* untuk 60 lampu/lentera dan lampu/lentera sebanyak 240 unit. Pengelolaan solar panel dan lentera tersebut dilakukan melalui RESCO (Renewable Energy



Meninjau Pemasangan Solar PV di Sekolah Dasar Masehi (SDM) Mbatakapidu Kabupaten Sumba Timur.

Service Company) yang dibentuk oleh HIVOS bekerja sama dengan swasta.

RESCO dikembangkan sebagai penghubung operasi bisnis dan kegiatan teknis yang berhubungan dengan pemasangan, pengoperasian, dan perawatan sistem

energi terbarukan. RESCO diharapkan sebagai solusi untuk mengatasi tantangan besar dan keberlanjutan jaringan listrik mini dan tersebar di Pulau Sumba. Melalui RESCO, setiap pelajar yang ingin mendapatkan lentera harus membayar sebesar Rp 400.000 yang dapat dicicil selama 3-4 tahun. Selanjutnya, jika siswa hendak men-charger lentera tersebut perlu membayar Rp 2.000 per lampu/lentera. Dengan adanya lampu tersebut, dapat membantu para siswa melakukan aktivitas belajar mengajar pada malam hari. Selain itu, penerangan dari lampu tersebut juga memberikan kesempatan kepada para orang tua untuk melakukan aktivitas yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi keluarga salah satunya membuat kerajinan rotan pada saat malam hari.



Diskusi Implementasi Program TERANG dari HIVOS.

Penjajakan dan Penyiapan Proyek Baru

Kegiatan Penyusunan Kajian Hutan Energi dan Penyusunan *Pre-Feasibility Studies (Pre-FS)* Proyek Energi Terbarukan

Pelaksanaan kegiatan Kajian Pemetaan Potensi Hutan Energi di Indonesia dan Penyusunan Pre-FS Proyek Energi Terbarukan merupakan salah satu kegiatan utama yang harus diselesaikan oleh Pokja II-Energi pada TA 2019. Kegiatan penyusunan Kajian Pemetaan Potensi Hutan Energi di Indonesia dan Penyusunan Pre-FS Proyek Energi Terbarukan sudah memasuki tahap persiapan dan pelaksanaan kegiatan.

- a. Kegiatan Kajian Pemetaan Potensi Hutan Energi di Indonesia masih dalam proses pengadaan tenaga ahli/konsultan. Adapun tenaga ahli/konsultan yang dibutuhkan terdiri dari 4 (empat) tenaga ahli, yaitu tenaga ahli bidang ekonomi energi, bidang kehutanan, bidang perencanaan wilayah dan bidang *Geographic*

Information System (GIS). Pengadaan tenaga ahli akan dilakukan melalui mekanisme pengadaan langsung. Ditargetkan pada bulan Juli 2019 proses pengadaan sudah selesai dan tenaga ahli/konsultan akan memulai proses penyusunan kajian tersebut.

- b. Kegiatan penyusunan Pre-FS Proyek Energi Terbarukan masih dalam proses pengadaan jasa konsultan yaitu pada tahap evaluasi administrasi. Proses pengadaan jasa konsultan dilaksanakan oleh Pokja II-Energi bekerja sama dengan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kementerian PPN/Bappenas. Ditargetkan pada Agustus 2019, proses pengadaan jasa konsultan sudah selesai dilaksanakan dan dihasilkan badan usaha yang akan menjadi pelaksana kegiatan.

Koordinasi Penyusunan *Project Pipeline Hub*

Pada tanggal 27 Mei 2019, Pokja II-Energi telah melakukan pertemuan dengan perwakilan Kementerian ESDM, USAID-ICED, dan UNDP di Hotel Rancamaya Bogor untuk membahas mengenai persiapan penyusunan *Project Pipeline Hub*. Hasil pertemuan tersebut antara lain:

- a. Dirjen. Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM akan menyampaikan daftar proyek energi terbarukan yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah kepada Kementerian PPN/Bappenas.
- b. Pokja II-Energi bersama dengan Kementerian ESDM,

USAID-ICED, UNDP dan GGGI akan menyusun metodologi dan *tools* untuk melakukan seleksi dan *filtering* proyek-proyek energi terbarukan baik yang diterima melalui Kementerian ESDM, Pokja Energi, UNDP, dan USAID-ICED.

- c. Proyek-proyek energi terbarukan hasil seleksi dan *filtering* selanjutnya akan dimasukkan dalam buku *List of Renewable Energy Project* Jilid II. Buku *List of Renewable Energy Project* Jilid II ditargetkan akan dicetak kembali pada bulan September 2019 mendatang.

Usulan Bantuan Bank Dunia untuk Penguatan Pokja II-Energi

Pada tanggal 26 Juni 2019, telah diselenggarakan rapat koordinasi pembahasan usulan bantuan pendanaan dari The Public – Private Infrastructure Advisory Facility (PPIAF) Bank Dunia. Pertemuan dihadiri oleh perwakilan Direktorat Pendanaan Luar Negeri Multilateral Bappenas, Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan Bappenas, Kantor Bank Dunia Indonesia, dan Pokja II-Energi. Dalam pertemuan tersebut, pihak Bank Dunia akan memastikan

prosedur aplikasi dalam mengakses bantuan hibah dari PPIAF Bank Dunia. Tim Direktorat dan Pokja II-Energi diminta untuk mempersiapkan dan mempertajam ToR yang telah disampaikan. Bantuan yang diusulkan kepada PPIAF adalah sebesar USD 250 Ribu yang ditujukan untuk mempersiapkan Pokja II-Energi dalam menawarkan layanan *Project Development Facility* kepada para pengembang proyek.

Kelompok Kerja Kelautan & Perikanan

3

COREMAP-CTI (Hibah Bank Dunia)

Penyusunan *Project Implementation Manual*

Sebagai salah satu tindak lanjut yang telah disepakati pada *Aide Memoire World Bank Implementation Support Mission* di bulan Februari, dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan COREMAP-CTI Bank Dunia, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap dokumen *Project Implementation Manual* (PIM). Dokumen PIM merupakan pedoman utama yang mengandung aspek administratif dan teknis terkait pelaksanaan seluruh kegiatan proyek COREMAP-CTI 2019 – 2022 sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mengamati adanya proses perubahan atau restrukturisasi yang sedang berlangsung terhadap kerangka proyek COREMAP-CTI Bank Dunia, maka dokumen PIM yang telah disusun oleh Pusat Penelitian Oseanografi (P2O) LIPI – selaku *Executing Agency* COREMAP-CTI dari komponen pendanaan pinjaman dan *Project Management Office* (PMO) COREMAP-CTI Bank Dunia – di tahun 2017 memerlukan penyesuaian yang signifikan. Dalam periode Triwulan 2 (April – Juni) 2019, baik Pokja III-Kelautan & Perikanan maupun P2O LIPI melaksanakan beberapa kegiatan dan konsinyasi dalam rangka memperbarui dokumen PIM tersebut. Hingga pada tanggal 14 Juni 2019, P2O LIPI selaku PMO mengirimkan secara formal *The Revised of Project Implementation Manual* (PIM) of COREMAP CTI 2019 kepada pihak Bank Dunia untuk pemeriksaan kembali. Saat ini pihak Bank Dunia masih dalam proses pemeriksaan untuk penerbitan *No Objection Letter* (NOL), sebelum dokumen PIM dapat diterbitkan secara resmi.



Penyusunan Pedoman Tata Kelola Hibah COREMAP-CTI

Dengan telah disusunnya PIM sebagai panduan untuk memberikan koridor dan rambu-rambu pelaksanaan seluruh kegiatan proyek COREMAP-CTI 2019 – 2022, khusus untuk pelaksanaan program yang dibiayai oleh dana hibah perlu disusun suatu dokumen turunan berupa Pedoman Tata Kelola Hibah COREMAP-CTI sebagai acuan teknis untuk menginformasikan, membimbing dan mendukung pelaksanaan program COREMAP-CTI hibah GEF Bank Dunia

yang pelaksanaannya akan melibatkan mitra pelaksana antara lain CSO, Institusi, maupun Pemerintah Daerah. Pokja III-Kelautan & Perikanan, Sekretariat ICCTF, serta Tenaga Ahli Penyusunan Pedoman Operasional Paket Hibah bekerja dalam penyusunan Pedoman Tata Kelola Hibah COREMAP-CTI. Beberapa kegiatan dilaksanakan dalam rangka penyusunan Pedoman Tata Kelola Hibah dengan turut melibatkan Kementerian/Lembaga serta unit kerja yang

berkaitan dengan implementasi pedoman tersebut. Pada tanggal 14 Juli 2019, Pokja III-Kelautan & Perikanan telah mengirimkan Draf Awal Pedoman Tata Kelola Hibah *Coral Reef Rehabilitation and Management Program – Coral Triangle Initiative* (COREMAP – CTI) kepada Bank

Dunia untuk proses reviu awal. Sebagai tindak lanjut, pada permulaan bulan Juni 2019 akan dilaksanakan diskusi peninjauan masukan terhadap Draf Awal dari Bank Dunia, Kementerian/Lembaga, dan unit kerja terkait.



Penandatanganan Amendment Legal Agreement COREMAP-CTI Bank Dunia

Pada tanggal 19 Juni 2019, dokumen Amandemen *Loan Agreement* (LA) IBRD 8336-ID and *Grant Agreement* (GA) TF015470 telah resmi ditandatangani oleh *Country Director* Bank Dunia dan Direktur Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko, Kementerian Keuangan. Amandemen *Grant Agreement* ini merupakan dokumen utama yang mengikat kedua belah pihak secara hukum dan berfungsi sebagai dasar implementasi program COREMAP-CTI Hibah GEF Bank Dunia oleh Kementerian PPN/Bappenas melalui ICCTF.

Dengan telah ditandatanganinya Amandemen *Grant Agreement* tersebut, program COREMAP-CTI Hibah GEF Bank Dunia di Kementerian PPN/Bappenas secara resmi dinyatakan aktif. Dalam agenda selanjutnya, akan dilaksanakan *Steering Committee Meeting* COREMAP-CTI Bank Dunia, *Grand Launching* COREMAP-CTI Bank Dunia dan *Call for Proposal* untuk Mitra Pelaksana program COREMAP-CTI Hibah GEF Bank Dunia.



COREMAP-CTI (Hibah ADB)

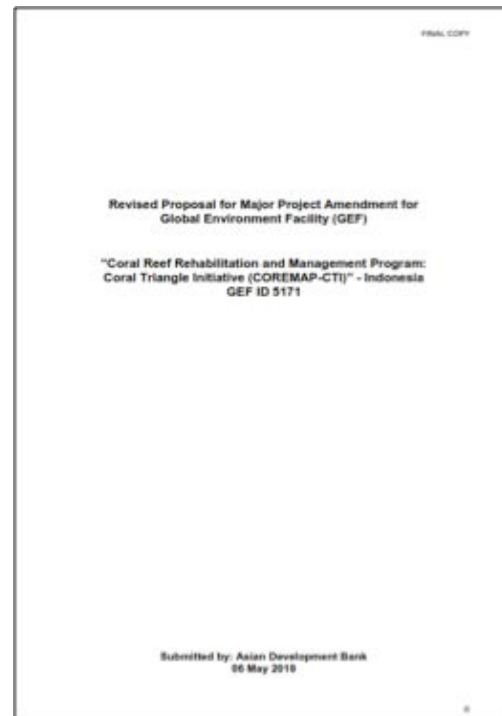
Dalam periode Triwulan I sampai dengan II (Februari – Mei 2019), Pokja III-Kelautan bekerjasama dengan ADB melakukan penyusunan dokumen *Revised Proposal for Major Amendment*. Pada dokumen revisi ini terdapat perubahan tujuan proyek menjadi “*Sustainable management of coral reef ecosystems in Indonesia through enhanced capacity to manage coral reef ecosystems in three (3) Marine Protected Areas (MPAs) in Lesser Sunda Seascape covering 30,000 hectares*”.

Komponen yang diusulkan adalah:

1. *Coral Reef Management and Institutions Strengthened in Project Areas.*
2. *Ecosystem-based Resource Management Plans Developed and Operational.*
3. *Sustainable Marine-Based Livelihoods Improved.*
4. *Project Management, Monitoring and Knowledge Transfer.*

Pada tanggal 6 Mei 2019, ADB mengajukan dokumen final *Revised Proposal for Major Project Amendment “Coral Reef Rehabilitation and Management Program: Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI)” – Indonesia GEF ID 5171* kepada GEF. Setelah itu sesuai dengan prosedur GEF, dokumen tersebut diunggah di laman GEF dengan tujuan untuk mendapatkan persetujuan dari anggota GEF *council*. Sejak diunggahnya restrukturisasi pada tanggal 18 Mei 2019, GEF memberikan periode waktu 1 bulan bagi anggota *council*

untuk mencermati dokumen tersebut. Pada tanggal 19 Juni 2019, proposal tersebut telah lolos dari tahap pencermatan oleh GEF *council*. Merespon hal tersebut, GEF saat ini dalam tahap penerbitan *endorsement letter* dari CEO GEF atas proposal tersebut.



Menyusun Cost Tab Hibah COREMAP-ADB

Pada waktu yang bersamaan, Pokja III-Kelautan & Perikanan dan ADB bekerjasama dalam mengidentifikasi langkah-langkah teknis selanjutnya pada proses restrukturisasi. Pada tanggal 24 Juni 2019, dilaksanakan pertemuan di kantor Pokja III-Kelautan & Perikanan untuk menindaklanjuti

hal tersebut. Dalam diskusi, ADB menekankan pentingnya penerapan mekanisme penyaluran hibah yang bersesuaian antara regulasi ADB dan Pemerintah Indonesia. Selain itu, dibahas pendetilan komponen proyek dan pembiayaan yang disajikan secara ringkas dalam tabel berikut:

No.	Komponen	Anggaran (Juta Dolar)	Detail Komponen
1.	<i>Coral reef management and institutions strengthened</i>	1,8	<ul style="list-style-type: none"> • Konsultan kawasan dan jenis (0.7 juta dolar) • Konsultan ekowisata (0.5 juta dolar) • Pelatihan, master degree (0.6 juta dolar)
2.	<i>Ecosystem-based resource management plans developed and operational</i>	1,4	Konsultan
3.	<i>Sustainable marine-based livelihoods improved</i>	1,4	Konsultan
4.	<i>Project management, monitoring and evaluation</i>	0,6	Project Manager (36 bulan), procurement (12 bulan), finance (36 bulan), move (18 bulan), safeguard (12 bulan), site manager (3 orang, 36 bulan)



Hal – hal yang menjadi poin penting dan teridentifikasi dalam pertemuan tersebut yaitu alur birokrasi yang akan ditempuh dalam pengajuan restrukturisasi, serta aspek teknis dalam proses memo internal yang akan menghasilkan dokumen amandemen *legal agreement*.

Tindak lanjut yang disepakati yaitu:

1. Surat Usulan dari Kementerian Keuangan ke ADB

Saat ini Direktorat Pendanaan Luar Negeri Multilateral Bappenas telah mengirimkan surat kepada Direktorat Pinjaman dan Hibah, DJPPR terkait dengan usulan perubahan desain proyek. Langkah selanjutnya yaitu DJPPR mengirimkan surat usulan atas perubahan desain proposal restrukturisasi COREMAP-CTI ADB kepada Asian Development Bank.

2. Proses Memo Internal ADB

Dalam rangka proses memo internal ADB yang memiliki produk akhir *amendment grant agreement*, Pokja III-Kelautan & Perikanan akan bekerjasama dengan ADB



dalam menyusun dokumen pendukung seperti ToR Paket Kegiatan, *Project Administration Manual (PAM)*, *cost tab/detail costing*, dan proses pengalihan rekening khusus.

3. Rekrutmen Tenaga Ahli

Dalam rangka operasionalisasi proyek COREMAP-CTI Hibah GEF ADB, perlu dilakukan perekrutan tenaga ahli dan tenaga operasional pada unit pelaksana COREMAP-CTI di bawah Pokja III-Kelautan & Perikanan. Pokja III-Kelautan & Perikanan akan memulai dengan proses penyusunan ToR/KAK dan permintaan *No Objection Letter* kepada ADB. Rencana pelaksanaan rekrutmen dimulai pada bulan Juli 2019.

Dalam rencana selanjutnya, akan dilaksanakan pertemuan dengan ADB pada awal bulan Juli 2019 untuk membahas progres restrukturisasi, serta pertemuan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka identifikasi kegiatan dan penyusunan *detail costing*.

Blended Finance

Pembahasan *Blended Finance* di Washington DC

Pada tanggal 9-17 April 2019, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bapak Bambang Brodjonegoro dan tim Bappenas melakukan pertemuan terkait dengan implementasi *Blended Finance on Marine Conversation and Fisheries* sebagai rangkaian kegiatan pertemuan tahunan IMF – World Bank di Washington DC, Amerika Serikat. Kegiatan ini bekerjasama dengan RARE, sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) konservasi global. RARE sebelumnya telah menjalankan konsep *blended finance* dalam bidang perikanan di Filipina yang dinilai oleh Menteri Bappenas bahwa konsep ini berpeluang besar untuk diterapkan di Indonesia.

Struktur *blended finance* di bidang perikanan dan kelautan mencakup beberapa komponen utama seperti investor, penjamin, otoritas pembiayaan kredit dan badan pengatur yang dapat berupa usaha berbadan hukum.

Dalam pertemuan ini Bappenas dan RARE sepakat untuk membentuk *Marine Financing Authority (MFA)* yang mengikuti cetak biru lembaga keuangan dalam penyaluran dana kepada Pemerintah Daerah dan entitas bisnis lainnya pada tingkat Provinsi.



Penyusunan Dokumen *Blended Finance* dengan RARE dan PT. Bahana

Topik *blended finance* dalam bidang kelautan dan perikanan selanjutnya dibahas dalam pertemuan di Ruang Rapat Sekretaris Kementerian PPN/Bappenas pada tanggal 15 Mei 2019 yang dipimpin oleh Sekretaris Utama Bappenas melibatkan Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas, *Vice President* RARE Indonesia, Presiden Direktur PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan *Team Leader* Pokja III-Kelautan & Perikanan.



Hasil dari pertemuan ini adalah arahan untuk menyusun dokumen *blended finance* bekerja sama dengan RARE dan PT Bahana. Selain itu diperlukan pembahasan tindak lanjut dengan melakukan audiensi kepada ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan melakukan konsultasi teknis dengan PT Bahana Artha Ventura.



Technical Meeting dengan Ketua OJK, RARE dan Bappenas

Pada tanggal 27 Mei 2019, Sestama Bappenas didampingi oleh Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas, *Vice President* RARE dan tim Pokja III-Kelautan & Perikanan melakukan pertemuan dengan Ketua OJK, Prof. Wimboh Santoso untuk berkonsultasi terkait penerapan *blended*

finance di bidang kelautan dan perikanan. Ketua OJK mengarahkan agar dalam penerapannya *blended finance* melibatkan pihak swasta nasional yang bergerak dalam bidang perikanan dan kelautan.



Penjajakan Penerapan *Blended Finance* di Kendari

Pada tanggal 21 Juni 2019, tim Bappenas yang dipimpin oleh Sekretaris Utama Bappenas, Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas, serta *Team Leader* dan perwakilan Pokja III-Kelautan & Perikanan melakukan kunjungan di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Tujuan dari kunjungan ini adalah untuk melakukan dialog dengan Pemerintah Provinsi terkait rencana implementasi

blended finance di Provinsi Sulawesi Tenggara. Salah satu alasan pemilihan Provinsi Sulawesi Tenggara adalah hasil perikanan dan kelautannya yang tinggi sehingga menjadi kandidat terbaik untuk rencana implementasi *blended finance*. Kegiatan yang dilakukan meliputi pertemuan dengan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara bersama dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dalam kunjungan ini tim Bappenas disambut dengan baik oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara dan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) meliputi Dinas Kelautan dan Perikanan dan Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara. Gubernur merespon dengan baik inisiatif Bappenas untuk mengimplementasikan konsep *blended finance* di Provinsi



Sulawesi Tenggara. Pihak Pemerintah Provinsi menyatakan kesiapan sebagai penjamin implementasi program *blended finance* di Sulawesi Tenggara. Secara terpisah tim Bappenas melakukan pertemuan dengan ketua kelompok nelayan Kabupaten Kolono dan perwakilan anak perusahaan PT Bahana di Kendari.



Conference Call bersama RARE USA

Sebagai bentuk dukungan Bappenas terhadap rencana pembentukan *Marine Financing Authority* (MFA)/Otoritas Pendanaan Kelautan dan Perikanan (OPKP), tim Bappenas yang diwakili oleh Pokja III-Kelautan & Perikanan sepakat untuk melakukan konsultasi teknis virtual (*conference call*) dengan tim RARE USA yang dipimpin oleh *Vice President*

Blended Finance, Ms. Valeria Ramundo Orlando. Konsultasi teknis virtual ini dilakukan secara berkala setiap hari Kamis pukul 07.00 WIB. Pembahasan yang dilakukan setiap minggunya meliputi perkembangan dan kendala dihadapi dalam persiapan implementasi *blended finance* di Indonesia.

Blue Carbon

Sosialisasi *Blue Carbon* ke Balai PPI Karhutla Jawa, Bali dan Nusa Tenggara

Dalam rangka identifikasi dan sinergisme kegiatan antara rencana *Blue Carbon Strategy Framework Action*, dilakukan kunjungan kepada Badan Pembinaan Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan (PPI dan Karhutla) Wil. Jawa, Bali dan Nusa Tenggara sebagai pelaksana teknis di bidang perubahan iklim dan kebakaran hutan dan lahan pada tanggal 2 – 4 Mei 2019.

Kepala Balai PPI Karhutla Jawa Bali dan Nusa Tenggara, Ir. Anak Agung Gede Putra, M.Si., menyampaikan BPPI Karhutla mengelola area hutan mangrove seluas 1.300 ha di wilayah Bali. Akan tetapi luasan tersebut diekspektasi akan mengalami pengurangan dengan adanya pengaruh dari kegiatan reklamasi yang berdampak pada degradasi lahan mangrove. Kegiatan yang saat ini dilakukan oleh BPPI Karhutla antara lain terdiri dari:

- Fasilitasi pengembangan skenario iklim/adaptasi perubahan iklim berbasis ekosistem
- Fasilitasi wilayah dalam *downscaling* rencana aksi perubahan iklim
- Fasilitasi Program Kampung iklim (Proklim)
- Penyebarluasan informasi perubahan iklim dan
- Pendampingan/Bimtek
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
- Pembuatan desain pembangunan Proklim
- Pelatihan dan pengelolaan ekosistem mangrove sebagai upaya pengendalian perubahan iklim
- Fasilitasi pengembangan jejaring mitra REDD+
- Updating data-data perubahan iklim dan kebakaran hutan dan lahan di wilayah kerja melalui kajian sederhana
- Pemutakhiran perangkat mitigasi perubahan iklim dan lain sebagainya.

Pengelolaan mangrove oleh BPPI Karhutla saat ini masih terfokus ke pembinaan perubahan iklim dari perspektif darat. Hal ini dikarenakan target *Blue Carbon* belum terkuantifikasi dan metode pengukurannya belum tersosialisasikan. Ke depannya, BPPI Karhutla ingin mengembangkan ke arah tersebut. BPPI Karhutla juga bersedia berpartisipasi dalam hal pelaporan dan penyediaan data. Pokja III-Kelautan & Perikanan menanyakan prospek pelibatan kampung iklim, dan BPPI Karhutla menyampaikan bahwa sudah ada rencana pembinaan kampung iklim di wilayah pesisir dalam rangka mendukung upaya *Blue Carbon*.

Prospek kerjasama ke depannya, BPPI Karhutla ingin mengembangkan laboratorium lapangan dan lokasi percontohan. Pokja III-Kelautan & Perikanan menyampaikan hal tersebut selaras dengan prospek kerjasama yang saat ini sedang dalam tahap diskusi dengan DFAT Australia sehingga kerjasama dapat dirancang ke arah tersebut.



Inception Workshop Penyusunan Pelaksanaan IBCSF

Pada tanggal 20 Mei 2019, dilaksanakan *Inception Workshop* yang bertujuan untuk menepati arahan Bapak Menteri PPN/Bappenas untuk mengarusutamakan *Sustainable Development Goals* (SDGs) khususnya Goal 13 tentang Perubahan Iklim dan Goal 14 tentang Ekosistem Lautan dalam penyusunan RPJMN 2020-2024, serta sebagai tindak lanjut pertemuan koordinasi antar kementerian sebelumnya di tanggal 2 November 2017.

Langkah yang penting untuk ditindaklanjuti dari hasil pertemuan sebelumnya yaitu Pembentukan suatu entitas Sekretariat Nasional yang diampu oleh Kementerian/ Lembaga dan pemangku kepentingan yang terkait dalam isu *Blue Carbon* Nasional IBCSF. Selain itu, dari Kerangka Strategi *Blue Carbon* yang sudah dikembangkan, perlu disusun suatu rencana aksi yang optimal untuk kepentingan nasional. Peserta kegiatan memahami bahwa guna pengarusutamaan isu *Blue Carbon* dalam perancangan kebijakan di Indonesia, pembentukan suatu Sekretariat Bersama guna koordinasi yang terpusat antar sektor merupakan prioritas tertinggi. Pembentukan sekretariat akan digerakkan oleh Bappenas dan Kemenko Maritim. Pokja III-Kelautan diusulkan sebagai rumah dimana instrumen sekretariat beroperasi. Hal terpenting setelahnya yaitu inventarisasi dan pembentukan *baseline data*, target, serta landasan kebijakan guna penyusunan rencana aksi pengelolaan karbon biru. Sasaran jangka panjang dari isu *Blue Carbon* yaitu memasukkan kuantifikasi *Blue Carbon* dalam target NDC nasional.



Kegiatan Lainnya

Kerjasama dengan USAID dalam Kegiatan Kajian *Bioeconomic Modelling* Sumberdaya Perikanan

Pertemuan antara *Director of Environment* USAID, Sestama Bappenas, Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas dan didampingi oleh *Team Leader* Pokja III-Kelautan & Perikanan membahas peluang kerjasama antara Bappenas dan USAID dalam bidang perikanan. Pihak USAID menyatakan kesanggupan memberikan bantuan untuk *Technical Assistant* berupa konsultan dalam pengerjaan analisis *Bioeconomic Modelling* Sumberdaya Perikanan di Indonesia bagian Timur yang mencakup laut Arafura dan Laut Timur (Wilayah Pengelolaan Perikanan 718).

USAID juga menyatakan harapan untuk melakukan kerjasama dan koordinasi dengan Proyek COREMAP CTI yang diimplementasikan di Bappenas, hal ini terkait dengan implementasi Proyek USAID dalam Bidang Kelautan dan Perikanan di Daerah Laut Maluku dan Raja Ampat (WPP 715).

Sebagai tindak lanjut Pokja III-Kelautan & Perikanan diharapkan dapat mengembangkan kerangka acuan untuk kebutuhan *Technical Assistant* dan USAID berharap tetap dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi COREMAP-CTI di tingkat Provinsi.





Komunikasi, *Outreach* & Kemitraan

ICCTF bersama UGM Kombinasikan *Smart Farming* dan Budidaya Padi Metode SRI

ICCTF bersama dengan FTP-UGM bersinergi mengembangkan budidaya padi dengan metode *System of Rice Intensification* (SRI) di Wuku Kalara, Kampera, Sumba Timur. Upaya budidaya padi SRI merupakan bagian dari strategi adaptasi terhadap perubahan iklim. Dampak perubahan iklim membawa pengaruh besar terutama kepada kelompok masyarakat yang hidup menggantungkan mata pencahariannya pada pertanian. Metode SRI merupakan inovasi teknologi berupa telemetri tanah, udara dan air dilengkapi aplikasi berbasis web dan android yang dapat membantu petani dalam menentukan waktu tanam, pola tanam dan varian tanaman.

Pengembangan budidaya padi di Wuku Kalara dapat dijadikan sebagai preseden dalam praktik penerapan teknologi *smart farming*. Rangkaian kegiatan panen raya ini dilakukan sebagai upaya ekspos keberhasilan penerapan metode *System of Rice Intensification* (SRI) kepada pemangku kepentingan di berbagai tingkatan yang diharapkan dapat mendorong replikasi di wilayah lain. Kegiatan panen raya dihadiri oleh Umbu Lili Pekuwali, Wakil Bupati Sumba Timur, Andi Abikusno Direktur Operasional Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF), Ir. Rohmad Supriadi, Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana (Renortala) Kementerian PPN/Bappenas, Jason Seuc, Direktur Pelaksana dari Kantor Lingkungan Hidup United States Agency for International Development (USAID), Dr. Dwi Rudi Hartoyo Direktur Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup, Kemendesa PDTT dan Bayu Dwi Apri Nugroho, STP, M.Agr., Phd., selaku perwakilan Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem, Universitas Gadjah Mada (UGM).

Pengembangan budidaya padi di Wuku Kalara merupakan replikasi kegiatan serupa di Kabupaten Kupang, dimana rata-rata metode konvensional menghasilkan 5-6 ton/ha. Baumata, juga mengalami peningkatan produktivitas padi hingga 3 ton/ha. Peningkatan signifikan terjadi di Desa Tarus dari semula rata-rata hasil panen padi 5,6 ton/ha menjadi 12 ton/ha atau hampir 200% di lahan pertanian seluas 28 ha. Sebagai respon keberhasilan metode SRI dalam meningkatkan produktivitas padi, Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) menginstruksikan penerapannya diseluruh wilayah NTT di tahun 2018.

Keberhasilan proyek menuai apresiasi dari berbagai pihak, salah satunya adalah Dr. Dwi Rudi Hartoyo selaku Direktur Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup, Kemendesa PDTT. Beliau menyampaikan bahwa metode ini telah berhasil menjadi alternatif sistem produksi pertanian ramah lingkungan yang efektif meskipun diterapkan di daerah yang kekurangan air. Kemendesa PDTT kedepan berencana akan membentuk demplot untuk implementasi *Precision Agriculture* (PA) atau Pertanian Presisi untuk mengoptimalkan input dan mendapatkan hasil pertanian yang maksimal dengan memanfaatkan data lingkungan pertanian.

ICCTF dan FTP-UGM mulai memperluas penerapan metode SRI, sekaligus mengembangkan *smart-agriculture* di daerah irigasi Kambaniru, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Penerapan *smart agriculture* dilakukan melalui teknologi untuk mengukur anasir iklim dan debit air berbasis *software*.



NTT merupakan daerah beriklim kering yang dipengaruhi angin musim, sehingga penerapan pola tanam yang kurang adaptif terhadap perubahan iklim dapat berimplikasi pada rendahnya produktivitas lahan serta ketidakstabilan hasil panen. Metode SRI menjawab tantangan masyarakat petani terutama di daerah kering dan rentan sebagai strategi adaptasi perubahan iklim yang paling tepat guna. Kegiatan adaptasi dalam program ini bertujuan untuk mengembangkan strategi ketangguhan iklim dan mencegah kerentanan petani serta lahan pertaniannya akibat kekeringan.

Pemanfaatan lahan di Kabupaten Sumba Timur didominasi untuk kegiatan pertanian, mencapai 85% dari total lahan. Menurut Wakil Bupati Sumba Timur, Umbu Lili Pekuwali, pengelolaan lahan pertanian masih belum optimal, sehingga diharapkan metode SRI dapat mengurangi biaya produksi dan meningkatkan pendapatan petani. Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Timur telah berkomitmen memasukkan program ke dalam RPJMD dan RKP tahun 2020. Dukungan berbagai pihak dan koordinasi lintas sektor diperlukan untuk terus mengawal keberlanjutan program dan perbaikan pelaksanaan kedepan.

“Awalnya petani ragu, karena pola tanam 1 anakan ini kami anggap sangat beresiko. Namun saat ini kami sudah merasakan dampak baiknya” Gilbert Harangmbani, petani dari Desa Wuku Kalara

“Sudah ada perencanaan untuk memasukan program SRI dalam RPJMD dan RKP Tahun 2020 Kab. Sumba Timur. Dinas Pertanian akan terus mengawal metode SRI ini menjadi salah satu program unggulan,” – Muslihah, Penyuluh Pertanian

“Dengan metode SRI ini dapat menjadi bantuan yang tepat bagi pertanian. SRI dapat memberikan informasi yang tepat untuk kondisi pra panen seperti musim tanam yang tepat, kapan waktu pemberian pupuk, dan lainnya kepada petani” - Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tatalaksana Kementerian PPN/ Bappenas, Rohmad Supriyadi

“Pemerintah juga berusaha meningkatkan produksi dari lahan yang sudah ada dengan teknologi yang ada ini yaitu SRI pada Desa Wuku Kalara sebagai *pilot project*. Kami akan mendorong metode ini dapat direplikasi ke wilayah sekitarnya karena hasil nyatanya, sudah disaksikan dan dirasakan oleh petani” - Umbu Lili Pekuwali, Wakil Bupati Sumba Timur.

“Penerapan sistem SRI ini mungkin merupakan solusi nyata bagi kondisi iklim di Sumba Timur dan kami sangat senang dapat menjadi bagian upaya peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim,” - Jason Seuc, Deputy Direktur Kantor Lingkungan Hidup United States Agency for International Development (USAID)

Melihat Peluang Kerjasama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Sejak awal tahun 2019, Sekretariat ICCTF telah membangun komunikasi yang erat dengan Direktorat Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup (Dit. PSDLH), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk rencana replikasi dan *scale-up* keberhasilan proyek-proyek ICCTF yang tersebar di banyak desa seluruh Indonesia. Beberapa kali diskusi telah dilakukan yang dimulai dengan memperkenalkan keberhasilan salah satu proyek ICCTF yaitu metode penanaman Padi SRI dan *Smart Farming System* di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Hasil perpaduan Metode SRI dan aplikasi teknologi *smart farming* ini menghasilkan peningkatan signifikan produksi padi, sebagai contoh di Desa Tarus yang semula rata-rata hasil panen padi konvensional 5,6 ton/ha menjadi 12 ton/ha pada luas lahan replikasi percontohan 28 ha.

Tindak lanjut dari pertemuan ini, Dit. PSDLH, Kemendes PDTT telah melakukan rangkaian rapat koordinasi bersama para pihak yang telah mengembangkan metode SRI dan *smart farming system* ini di tingkat nasional untuk membahas perencanaan program tersebut kedalam Rencana Kerja Kemendes PDTT Tahun 2020. Selanjutnya, Sekretariat ICCTF juga berkesempatan mengundang Direktur PSDLH,

Kemendes PDTT untuk melihat secara langsung hasil proyek ICCTF-FTP UGM tentang metode SRI dan *Smart Farming System* ini di Waingapu, NTT pada tanggal 25 April 2019 dalam rangkaian Panen Raya Padi SRI. Dalam acara ini juga turut hadir Wakil Bupati Sumba Timur, Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana Bappenas, dan SKPD terkait ditingkat provinsi maupun kabupaten.

Diskusi pengembangan program bersama ini menjadi lebih luas dengan mulai melihat potensi proyek lainnya dibidang Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Dit. PSDLH, Kemendes PDTT berkeinginan untuk mencari alternatif pengembangan EBT skala kecil yang dapat diimplementasikan pada 2248 desa tertinggal yang belum mendapatkan akses listrik. Hasil rangkaian diskusi terkait EBT, Kemendes PDTT berharap dapat menemukan beberapa skema bisnis dan investasi skala kecil pembangkit EBT yang dapat dikelola oleh BUMDES melalui penyertaan modal dari dana desa. Sekretariat ICCTF telah menyampaikan beberapa hasil pembelajaran proyek ICCTF terkait EBT seperti *Solar Water Pump*, *Biomass-woodpellet*, dan *Biodigester-bioslurry* sebagai salah satu skema yang dapat dikembangkan melalui pengelolaan BUMDES.

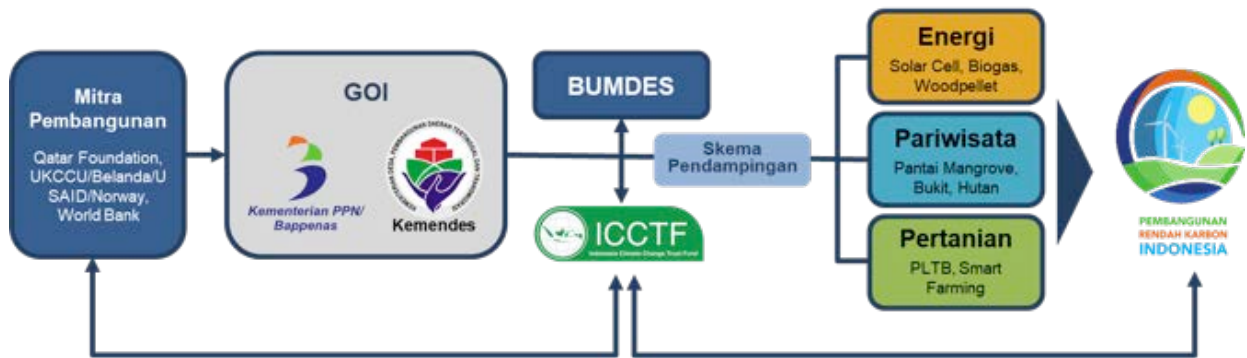


Audiensi Sekretariat ICCTF-Enerbi bersama Dirjen PDT, Kemendes PDTT, 20 Juni 2019.

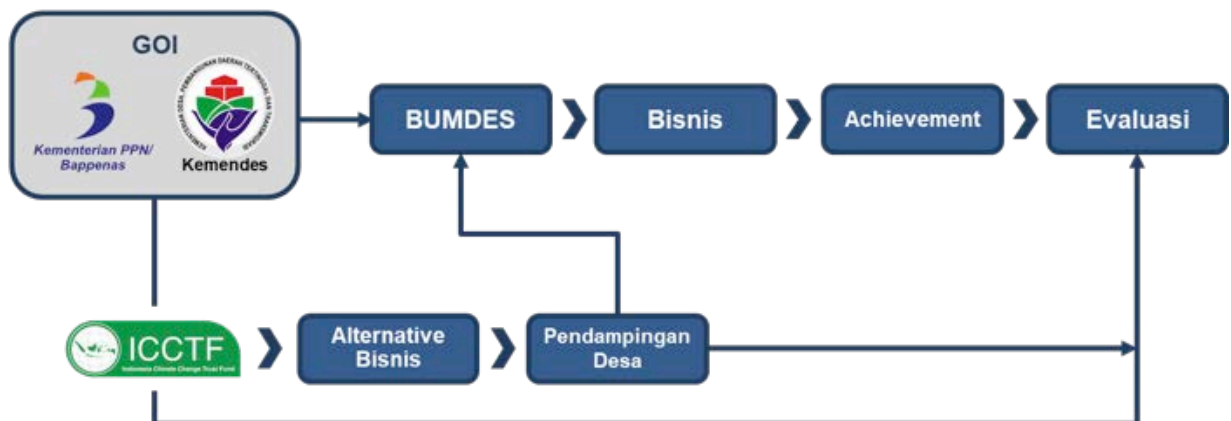
Oleh karena itu, Sekretariat ICCTF bersama Enerbi diundang untuk mempresentasikan ide-ide pengembangan EBT hasil pembelajaran proyek terdahulu kepada Dirjen Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) pada tanggal 20 Juni 2019. Dirjen PDT sangat tertarik dan antusias dengan ide-ide pengembangan EBT yang disampaikan ICCTF-Enerbi tersebut dan mengharapkan ICCTF menyusun proposal yang memuat *list* proyek pengembangan EBT, Pariwisata dan Pertanian serta bisnis model dan skema pendampingannya yang dapat dilaksanakan oleh BUMDES. Beliau juga berkomitmen akan membantu mendukung dan memfasilitasi pengajuan proposal tersebut kepada Dirjen

Pembangunan Kawasan Pedesaan, Kemendes PDPT yang menangani BUMDES serta potensial donor/mitra pembangunan yang tertarik mendanai pengembangan EBT ditingkat desa maupun sistem *off-grid* skala kecil. Salah satu potensi pendanaan yang telah diidentifikasi adalah Qatar Foundation dengan ketertarikan pada program EBT yang langsung dirasakan oleh masyarakat di tingkat tapak. Untuk itu, ICCTF bersama Kemendes PDPT akan menyusun proposal bersama untuk mengakses pendanaan tersebut. Diskusi intensif penyusunan proposal ini akan dilaksanakan pada bulan Juli – September 2019.

Skema Bisnis Proses Pengembangan EBT di Daerah Tertinggal



Skema Pendampingan



Skema Bisnis Proses Pengembangan EBT dan Skema Pendampingan BUMDES yang akan dilakukan bersama ICCTF – Kemendes PDPT.

Kontribusi terhadap Film Dokumentasi *Development Channel* Bappenas

Indonesia Climate Change Trust Fund mendampingi tim Hubungan Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas dalam peliputan proyek pendanaan di bidang energi “*Scale Up* Sistem Pengangkatan Air Tenaga Surya di Dusun Banyumeneng II, Panggang, Gunungkidul, Yogyakarta” yang dilaksanakan oleh Yayasan Energi Bersih Indonesia (EnerBi). Proyek *Scale Up* Sistem Pengangkatan Air Tenaga Surya yang dilaksanakan sejak April 2016 ini berhasil memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar.

Sebelumnya, masyarakat harus berjuang untuk mengambil air ke sumber sungai bawah tanah dengan berjalan 3,2 km/hari atau menghabiskan setidaknya Rp 150.000 per bulan untuk membeli air. Pengeluaran untuk air bersih tentu sangat memberatkan bagi masyarakat yang memiliki rata-rata pendapatan sekitar Rp 400.0000 per bulan. Kekeringan yang melanda Gunungkidul ini banyak membawa kerugian bagi masyarakat. Bukan hanya kerugian secara ekonomi yang harus ditanggung oleh masyarakat, tetapi juga dampak sosial berupa konflik horizontal akibat memperebutkan air. Kini, setelah 10 tahun mengalami kekurangan air bersih, 40 rumah tangga di desa Banyumeneng Gunungkidul dapat merasakan kemudahan dalam mengakses air bersih dari berbagai tandon distribusi disekitar mereka.

Peliputan proyek pendanaan “*Scale Up* Sistem Pengangkatan Air Tenaga Surya di Dusun Banyumeneng II, Panggang, Gunungkidul, Yogyakarta” ini nantinya akan ditayangkan dalam *Development Channel* Kementerian PPN/Bappenas. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari dukungan ICCTF kepada Bappenas untuk pengembangan konten *Development Channel* Kementerian PPN/Bappenas dengan tema energi.

Pengambilan gambar dilakukan di Watu Payung Turunan, Desa Giriharjo mulai dari area sungai tempat pompa *submersible*, pipa dan *reservoir*, hingga bukit tempat panel surya terpasang. Dalam proses pengambilan gambar ada beberapa narasumber yang diwawancarai diantaranya Sudaryanto (*Project Team Leader ICCCTF-USAID*), Aris Eko Widiyanto (Kepala Desa Giriharjo, Gunungkidul), Bambang Riyanto (Kabid Fisik & Prasarana Bappeda Gunungkidul), dan Dinar Ari Prasetya (Presiden Direktur EnerBi).

Selain pendampingan pengambilan gambar untuk *Development Channel* Kementerian PPN/Bappenas diproyek yang dilaksanakan oleh EnerBi, pertemuan ini juga mendorong adanya Studi Kelayakan Sistem Pengangkatan Air Tenaga Surya di Dusun Tegalweru, Desa Tepus, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul.



Partisipasi ICCTF dalam Koordinasi Mitra dan Sosialisasi Perencanaan Serta Sistem Pemantauan Restorasi Gambut di Provinsi Kalimantan Barat

BRG menyelenggarakan kegiatan koordinasi dengan mitra di daerah pada tanggal 27 Juni 2019 di Pontianak. Kegiatan bertujuan untuk menjalin komunikasi antara BRG, TRGD dan para mitra di daerah terkait perencanaan dan pelaksanaan restorasi gambut tahun 2019. Deputi II Bidang Konstruksi, Operasi dan Pemeliharaan BRG menyampaikan telah dilakukan revisi terhadap Peta Indikatif Lahan Gambut dengan luasan lahan gambut mencapai 2,6 juta ha sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala BRG No. 16 tahun 2018. Dalam rangka konsolidasi data restorasi gambut, mitra di daerah diharapkan dapat melakukan pembaruan informasi proyek/kegiatan yang dilakukan mencakup lokasi dan durasi pelaksanaan melalui aplikasi yang dibangun BRG.

ICCTF memiliki beberapa proyek kerjasama dengan mitra pelaksana di Provinsi Kalimantan, salah satunya dengan Universitas Tanjungpura yang telah bekerja di 19.000 ha lahan gambut. Disamping itu, melalui pendanaan hibah UKCCU, ICCTF bekerjasama dengan mitra pelaksana membangun 40 sumur bor dan 8 sekat kanal pada tahun 2017-2018. Tidak hanya kegiatan restorasi, ICCTF juga mendorong adanya penanaman kembali (revegetasi) dan revitalisasi sumber-sumber mata pencaharian masyarakat di lahan gambut. Melalui berbagai kegiatan dan hasil fisik yang telah terbangun, diharapkan Pemerintah Daerah setempat dapat berkomitmen mengalokasikan anggaran untuk keberlanjutan dan pemeliharaan.

ICCTF Menjadi Narasumber Diskusi Akses dan Peluang Pendanaan Iklim di Indonesia

Indonesia Climate Change Trust Fund mengisi diskusi "Akses dan Peluang Pendanaan Iklim di Indonesia" yang diadakan oleh Friedrich Naumann Stiftung Indonesia dan Climate Institute pada 28 Juni 2019 di Ruang Tengah Cafe, Jakarta. Sudaryanto selaku *Team Leader* PMU USAID mewakili ICCTF dalam diskusi ini menjelaskan bahwa ICCTF mengelola pendanaan iklim yang bersumber dari luar negeri untuk program adaptasi dan mitigasi, salah satu fokus program pendanaan mitigasi berbasis lahan. Program mitigasi tersebut didesain untuk mendukung usaha pemerintah Indonesia dalam mengurangi emisi yang berasal dari kerusakan hutan dengan mencegah konversi dan kebakaran hutan, serta meningkatkan praktek pertanian yang ramah lingkungan. Tahap pengelolaan dana yang dilakukan ICCTF adalah dengan melakukan sayembara proposal yang ditujukan kepada organisasi masyarakat sipil dengan pengalaman kerja di bidang mitigasi perubahan iklim, adaptasi, dan pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat.

Selain ICCTF, diskusi publik ini juga dihadiri oleh Climate Institute, Kemitraan, dan UNDP dengan peserta kurang lebih 40 orang. Secara garis besar diskusi publik ini menjelaskan bahwa terdapat tiga sumber pendanaan iklim di Indonesia. Pertama, berasal dari dana

publik melalui alokasi APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). Kedua, pembiayaan yang berasal dari luar negeri dalam bentuk hibah atau pinjaman. Ketiga, pembiayaan yang diberikan oleh sektor swasta, salah satunya adalah CSR (*Corporate Social Responsibility*) perusahaan yang digunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang memiliki dampak sosial terhadap masyarakat.

Tak kalah menarik, ada pula bentuk pendanaan swasta yang bersifat progresif atau dikenal dengan istilah obligasi hijau (*Green Bond*). Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, obligasi hijau adalah surat berharga yang bersifat utang yang dana hasil penerbitannya digunakan untuk membiayai kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.





Keuangan & Audit



Informasi Keuangan Periode 1 Januari - 30 Juni 2019

Sebagai satu-satunya Lembaga Dana Perwalian Perubahan Iklim Nasional di Indonesia, ICCTF selalu memegang prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam setiap kegiatan terkait keuangan sehingga, prinsip tata kelola organisasi dapat tercapai.

Bagian Keuangan ICCTF secara rutin mengadministrasikan, menyiapkan dan melaporkan semua kegiatan pelaksanaan secara tertib dan sesuai dengan kaidah tata kelola yang

Sebagai bentuk pertanggungjawaban yang menganut prinsip transparansi dan akuntabel, Laporan Keuangan ICCTF setiap tahunnya diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Internasional dan Badan Pemeriksa Keuangan Negara. Pada tahun 2019, audit Laporan Keuangan ICCTF dilakukan untuk Dana Hibah DANIDA Periode Januari – Maret 2019 oleh Kantor Akuntan Publik Wisnu Karsono Soewito & Rekan (JPA International) dengan opini wajar tanpa pengecualian. Untuk Kuartal II ini, sudah dilakukan lelang untuk Konsultan Audit untuk Dana USAID dan UKCCU. Pekerjaan Audit untuk Hibah USAID dan UKCCU akan dimulai pada Kuartal III tahun 2019.

baik. Pada tahun 2019 ICCTF mengelola dana Rupiah Murni APBN sebesar 34,47M dan dana Hibah Luar Negeri sebesar 34,97M. Total dana yang dikelola Tahun 2019 adalah 69,47M. Capaian pada kuartal 2 tahun 2019 adalah sebesar 24,57M yaitu 35% dari total dana yang dikelola.

Untuk rincian alokasi dana tersebut, bisa dilihat pada table di bawah ini:

Sumber Dana	Anggaran	Penyerapan		Sisa Anggaran
APBN - Sekretariat ICCTF	6.289.405.000	2.548.007.223	41%	3.741.397.777
APBN - DM ICCTF	3.000.000.000	2.487.530.036	83%	512.469.964
APBN - Pokja I ICCTF	10.430.595.000	3.616.191.731	35%	6.814.403.269
APBN - Pokja II ICCTF	4.500.000.000	900.010.473	20%	3.599.989.527
APBN - Pokja III ICCTF	9.500.000.000	2.561.470.798	27%	6.938.529.202
HIBAH - Pokja III ICCTF	200.000.000	-	0%	200.000.000
PPK	750.000.000	337.593.983	45%	412.406.017
DANIDA - SDGs	2.480.808.808	2.480.808.808	100%	-
USAID	7.534.738.695	4.297.740.621	57%	3.236.998.074
UKCCU	24.961.779.495	7.598.428.722	30%	17.363.350.773
TOTAL	69.647.326.998	26.827.782.395	39%	42.819.544.603

Lampiran

Media Coverage

Budidaya Padi di Sumba, Teknologi dan Perubahan Iklim dalam VOAINdonesia.com tanggal 30/04/2019

Sektor pertanian di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan, termasuk penerapan teknologi dan perubahan iklim. Sebuah upaya tengah dilakukan untuk mengatasi tantangan itu sekaligus. Berikut laporannya.

YOGYAKARTA — Masyarakat Sumba Timur menyebut wilayahnya dengan slogan matawai amahu pada njara hamu. Kalimat itu, kurang lebih bermakna mata air yang jernih dan padang rumput untuk kuda yang hijau. Bukan sesuatu yang berlebihan, karena pulau ini memang dibelah Sungai Kambaniru yang mengalir dari Gunung Wanggameti menuju Laut Sawu.

Namun, tak sepanjang tahun sungai itu berlimpah air. Pulau Sumba, sebagaimana kebanyakan tanah di Nusa Tenggara Timur, hanya mengalami hujan selama 3 bulan dalam setahun. Jika kemarau datang, Sungai Kambaniru perlahan menurut debitnya. Karena itulah, kata Muslihin, seorang penyuluh pertanian di Kabupaten Sumba Timur, mayoritas petani disana dulu berladang. “Tanaman padi juga ada, tetapi padi ladang. Memang orang Sumba itu umumnya adalah peternak, memelihara ternak di ladang, di savana,” kata Muslihin.

Tahun 1992, pemerintah membangun bendungan di Kambaniru. Saluran irigasi pun dibuat, dan petani memiliki kesempatan lebih panjang menanam padi. Namun, hasilnya tetap tidak seberapa. Sampai kemudian, metode SRI (*System of Rice Intensification*) diperkenalkan pada mereka.

“Ada kita pakai petani yang masih muda menjadi demonstrator untuk melaksanakan metode SRI disini. Hasilnya memang begitu bagus. Dengan metode lama, tahun pertama kita hanya dapat 1,8, ton per hektar, kemarin dapat 4,8 ton per hektar dalam satu kali panen, gabah kering panen. Jadi dari 1,8 ton ke 4,8 ton. Itu baru dua kali panen,” kata Muslihin.

Dalam metode SRI ini, petani diajak menanam bibit pagi yang masih muda. Bibit ditanam ketika berumur 14 hari, bukan 21-30 hari seperti biasa. Langkah ini memperbanyak anakan tanaman. Perbedaan kedua, jarak tanam lebih lebar dengan satu lubang satu anakan saja. Bibit juga tidak boleh ditanam terlalu dalam dan pengairannya dilakukan berselang. Metode SRI, kata Muslihin sangat cocok karena daerah mereka miskin air. Tanaman padi ini justru tidak harus direndam air dalam jangka lama.

Kendalanya, kata Muslihin, adalah pola pikir. Petani sulit mengadopsi metode baru karena khawatir resiko gagal. Karena itu, dipilih petani muda sebagai contoh, dan ketika berhasil, petani tua pun sukarela mengikuti. Gilbert Harangmbani, petani dari Desa Luku Kalara mengaku metode ini sempat mereka pertanyakan. “Awalnya petani ragu, karena pola tanam 1 anakan ini kami anggap sangat beresiko. Namun saat ini kami sudah merasakan dampak baiknya,” kata Gilbert.

Metode dan Teknologi Baru

Metode ini diperkenalkan kepada petani oleh Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada. Mereka bekerja sama dengan Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) dan pemerintah daerah setempat. Selain SRI, UGM juga membawa teknologi ke dalam metode ini untuk meningkatkan hasil pertanian.

Petani diuntungkan dengan teknologi dari ini. Menurut Bayu Dwi Apri Nugroho dari Fakultas Teknologi Pertanian UGM, mereka membangun telemetri tanah, udara dan air. Aplikasi berbasis web dan android juga diperkenalkan untuk meningkatkan hasil panen, menghemat kebutuhan bibit, menghemat kebutuhan pupuk, dan mengurangi kebutuhan air hingga 25 persen.

“Termasuk dari sensor itu, kita juga bisa menghitung efek gas rumah kacanya, emisinya berapa. Salah satu tujuan pemerintah adalah mengurangi emisi gas rumah kaca. Dari situ akan kelihatan berapa emisi gas rumah kaca yang dihasilkan di suatu lahan pertanian. Karena selama ini, pertanian merupakan salah satu penyumbang terbesar gas rumah kaca,” kata Bayu.

Kerja sama pengembangan demplot SRI antara ICCTF dan UGM sudah dimulai sejak musim tanam pertama tahun 2018 hingga saat ini. Mereka mencatat, peningkatan produktivitas padi yang cukup signifikan. Dengan metode konvensional, petani menghasilkan 5-6 ton per hektar. Melalui metode SRI, rata-rata setiap petani mampu memanen tambahan 3 ton padi per hektar. “Peningkatan signifikan terjadi di Desa Tarus yang semula rata-rata 5,6 ton per hektar menjadi 12 ton per hektar,” tambah Bayu.

Proyek rintisan ini, kata Bayu, dimulai pada 2016. Setahun setelah itu, panen raya membuktikan hasil dua kali lipat dari metode konvensional. Pemerintah NTT pun meminta metode SRI dikembangkan terus ke seluruh wilayah provinsi itu. Sumba dipilih, kata Bayu, karena merupakan daerah kering dan wilayah tertinggal.

Adaptasi Perubahan Iklim

Jika metode ini berhasil diterapkan di wilayah miskin air, kata Bayu, langkah ini sekaligus merupakan bagian dari strategi adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Meski belum banyak memperoleh perhatian di kalangan petani Indonesia, efek buruk perubahan iklim sebenarnya sudah dirasakan. Apalagi bagi NTT yang beriklim kering.

Pekan lalu, petani dan sejumlah pihak yang terkait dalam pengembangan metode SRI melakukan panen raya di desa Luku Kalara, Kecamatan Kampera, Sumba Timur. Andi Abikusno, Direktur Operasional ICCTF hadir dalam acara tersebut. “Metode SRI adalah sebuah inovasi meningkatkan ketahanan pangan masyarakat sekaligus sebagai upaya adaptasi mengantisipasi perubahan iklim. Sektor adaptasi dan ketangguhan merupakan salah satu fokus area pendanaan ICCTF,” ujar Andi.

Hadir pula Jason Seuc, Direktur Pelaksana dari Kantor Lingkungan Hidup United States Agency for International Development (USAID). Jason mengatakan, pemerintah Amerika Serikat melalui USAID mendukung upaya Indonesia menurunkan emisi gas rumah kaca sektor kehutanan, pertanian, energi, dan sektor lainnya. Kepedulian itu merupakan bagian dari penanganan dampak perubahan iklim serta penanggulangan bencana alam.

Melalui kerjasama dan pemberian dana melalui ICCTF, Amerika Serikat terus terlibat dalam kerja sama mewujudkan pembangunan rendah karbon. Selain itu, juga meningkatkan ketahanan iklim untuk melindungi lingkungan dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia “Penerapan sistem SRI ini mungkin merupakan solusi nyata bagi kondisi iklim di Sumba Timur dan kami sangat senang dapat menjadi bagian upaya peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim,” kata Jason.

Bupati Sumba Timur, NTT, Gidion Mbilijora bahkan berharap, metode ini akan terus disebarluarkan di wilayahnya. “Karena hasil nyatanya, sudah disaksikan dan dirasakan oleh petani,” katanya. [ns/lb]

UGM-ICCTF Inisiasi “*Smart Farming*” Sektor Pertanian dalam koran-jakarta.com pada 26/4/2019

YOGYAKARTA – Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada (DTPB FTP UGM) Yogyakarta bersama Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) menerapkan metode modern dan teknologi pintar untuk meningkatkan hasil pertanian, khususnya di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Keduanya bersinergi mengembangkan budidaya padi dengan metode *System of Rice Intensification* (SRI) di Luku Kalara, Kampera, Sumba Timur. Metode SRI merupakan inovasi teknologi berupa telemetri tanah, udara dan air dilengkapi aplikasi berbasis web dan android yang bertujuan untuk meningkatkan hasil panen, menghemat kebutuhan bibit, menghemat kebutuhan pupuk, dan mengurangi kebutuhan air hingga 25 persen.

Tak hanya itu, aplikasi teknologi tersebut mampu menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Luku Kalara. Bayu Dwi Apri Nugroho selaku perwakilan DTPB FTP UGM menyampaikan pengembangan demplot SRI kolaborasi dengan ICCTF ini dilaksanakan mulai musim tanam pertama 2018 dan berlangsung sampai sekarang.

Hasilnya menunjukkan peningkatan produktivitas padi dengan metode SRI. Metode ini mereplikasi kegiatan serupa di Kabupaten Kupang rata-rata metode konvensional menghasilkan 5-6 ton per hektare (ha), di Baumata dengan metode SRI dapat meningkatkan produktivitas padi 3 ton/ha.

“Peningkatan signifikan terjadi di Desa Tarus yang semula rata-rata hasil panen padi 5,6 ton/ha, menjadi 12 ton/ha dengan metode SRI seluas 28 ha,” ungkap Bayu, dalam rilis yang diterima Kamis (25/4). Budidaya padi dengan metode SRI ini memiliki kelebihan yaitu hemat air, hemat bibit, hemat biaya, hemat waktu, dan organik sehingga rendah emisi dan ramah lingkungan.

Upaya budidaya padi SRI ini merupakan bagian dari strategi adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim mengingat efek buruk dari perubahan iklim sudah dirasakan oleh masyarakat umum di berbagai daerah di Indonesia.

Gandeng Bappenas, Papua Barat Dukung Pembangunan Rendah Karbon dalam Liputan6.com pada 18/6/2019

Liputan6.com, Jakarta - Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro menandatangani Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) antara Kementerian PPN/Bappenas dengan Papua Barat mengenai Pembangunan Rendah Karbon (PRK) bersama Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, di Jakarta, Selasa (18/6/2019).

Sebelumnya telah ada tiga provinsi yang telah menandatangani MoU dengan Kementerian PPN/Bappenas. Di antaranya, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.

Setelah penandatanganan MoU ini, Papua Barat menargetkan penurunan emisi GRK sebesar 15 persen terhadap *business as usual baseline* emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada 2020. Nanti akan ada empat hal yang menjadi fokus utama dalam kerja sama ini.

"Empat fokus tersebut di antaranya penyiapan integrasi kebijakan PRK di provinsi, penyusunan dokumen Rencana PRK Daerah, penguatan sistem online, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) PRK, serta dukungan penyiapan kegiatan PRK di Papua Barat," ujar Bambang.

Sebelumnya, Bambang pun sudah menjelaskan jika program PRK ini telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Untuk itu, Bambang akan mendorong pelaksanaan aksi penurunan emisi GRK sebagai bagian yang terintegrasi, tidak terpisahkan, dan dilaksanakan secara seimbang dengan pembangunan ekonomi dan sosial.

Tidak hanya itu saja, nantinya menurut Bambang, akan ada beberapa kebijakan seperti penurunan laju deforestasi dan peningkatan reforestasi hutan, peningkatan penggunaan energi terbarukan yang menggantikan energi fosil, efisiensi energi.

Kebijakan lainnya yaitu peningkatan produktivitas pertanian melalui intensifikasi pertanian, serta efisiensi pemanfaatan SDA dan peningkatan kualitas lingkungan yang akan terus ditingkatkan demi terjalankannya program ini.

Selain itu, Bappenas juga akan selalu melakukan inklusi dan pendampingan perencanaan PRK secara intensif untuk pemerintah provinsi. Akan ada beberapa provinsi yang menjadi percontohan. Dengan hal ini Bappenas berharap PRK dapat segera diikuti oleh seluruh provinsi di Indonesia.

Inggris Dukung RI Wujudkan Pembangunan Rendah Karbon di 34 Provinsi

Setelah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) meluncurkan laporan kajian Pembangunan Rendah Karbon (PRK) atau *Low Carbon Development Initiatives* (LCDI) pada Maret lalu, hari ini Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menandatangani Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) bersama Duta Besar Inggris untuk Indonesia, ASEAN, dan Timor Leste, H.E. Moazzam Malik di Jakarta, Selasa, 18 Juni 2019.

Bambang menjelaskan, adapun isi dari MoU tersebut mengenai dukungan dari pemerintah Inggris melalui DFID dan *Foreign Common Wealth Office* terkait dengan upaya Indonesia untuk mengimplementasikan *Sustainable Development Goals* dan LCDI.

"Untuk LCDI, kita sudah menyelesaikan strategi tingkat nasional, dan sudah diluncurkan April kemarin di sini, dan sudah disampaikan ke masyarakat internasional waktu di Bali," jelas Bambang.

Namun menurut Bambang, ke depannya Bappenas harus mendorong provinsi lainnya untuk membuat rencana aksi mereka di tingkat daerah. Untuk terwujudnya hal ini, bantuan Inggris sangat dibutuhkan sehingga nantinya seluruh provinsi di Indonesia bisa menerapkan inisiatif ini.

"Dengan bantuan dari Inggris ini, kita berharap seluruh daerah di 34 provinsi Indonesia dapat menyesuaikan rencana pembangunan mereka dengan LCDI yang sudah ada, dan turut andil mengurangi emisi," ujarnya.

Saat ini sudah ada tiga provinsi yang menandatangani MoU dan siap untuk melakukan LCDI, di antaranya Jawa Tengah, dan Jawa Barat, Sulawesi Selatan. Selain itu, Papua Barat kabarnya juga akan melakukan penandatanganan MoU pada siang ini.

Dalam penutupnya, Bambang berharap seluruh daerah dan provinsi lainnya agar bersiap akan inisiatif ini dan dapat ikut menerapkannya.

Bappenas Teken MoU Pembangunan Rendah Karbon dengan Papua Barat

dalam merdeka.com pada 18/6/2019 - 13:53

Merdeka.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brojonegoro menandatangani Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) dengan Provinsi Papua Barat mengenai Pembangunan Rendah Karbon (PRK). Sebelumnya, ada tiga provinsi yang telah menandatangani MoU ini, yakni Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.

Setelah penandatanganan MoU ini, Papua Barat menargetkan penurunan emisi GRK sebesar 15 persen terhadap *business as usual baseline* emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di 2020. Nantinya akan ada empat hal yang menjadi fokus utama dalam kerjasama ini.

"Empat fokus tersebut di antaranya penyiapan integrasi kebijakan PRK di provinsi, penyusunan dokumen Rencana PRK Daerah, penguatan sistem online Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) PRK, serta dukungan penyiapan kegiatan PRK di Papua Barat," kata Bambang di Jakarta, Selasa (18/6).

Program PRK ini telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Untuk itu,

Bambang akan mendorong pelaksanaan aksi penurunan emisi GRK sebagai bagian yang terintegrasi, tidak terpisahkan, dan dilaksanakan secara seimbang dengan pembangunan ekonomi dan sosial.

Tidak hanya itu, nantinya akan ada beberapa kebijakan seperti penurunan laju deforestasi dan peningkatan reforestasi hutan, peningkatan penggunaan energi terbarukan yang menggantikan energi fosil, efisiensi energi, peningkatan produktivitas pertanian melalui intensifikasi pertanian, serta efisiensi pemanfaatan SDA dan peningkatan kualitas lingkungan yang akan terus ditingkatkan demi terjalankannya program ini.

Bappenas juga akan selalu melakukan inklusi dan pendampingan perencanaan PRK secara intensif untuk pemerintah provinsi. Akan ada beberapa provinsi yang menjadi percontohan. Dengan hal ini Bappenas berharap PRK dapat segera diikuti oleh seluruh provinsi di Indonesia.

Indonesia- Inggris Sepakati Kerjasama Pembangunan Berkelanjutan dan Rendah Karbon

Jakarta, Melayutoday.com,-Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian PPN/Bappenas dengan United Kingdom dan Northern Island tentang Kerjasama dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Pembangunan Rendah Karbon berlangsung Selasa (18/6/2019) di Ruang Rapat DH 1-5, Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta.

Kerjasama ini dalam rangka memperingati 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Inggris. Kerjasama Kementerian PPN) Bappenas dan Department for International Development (DfID) memperkuat hubungan diplomatik dengan melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman antara Indonesia dan Inggris tentang kerjasama dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan pembangunan rendah karbon.

Kerjasama ini tentu saja memiliki tujuan untuk kemajuan kedua negara. "Terima kasih kami sampaikan kepada Pemerintah Inggris khususnya Department for International Development (DfID) dan Foreign and Commonwealth

Office (FCO) serta Dubes RI atas kerjasama ini. Proyek proyek kerjasama ini akan mendukung pelaksanaan tugas Bappenas. MoU ini akan memperkuat koordinasi kelembagaan, sinergi diantara proyek proyek kerjasama sehingga bisa lebih efektif dan efisien dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan berkelanjutan dan pembangunan rendah karbon," jelas Menteri PPN/Bappenas saat memberi sambutan.

Sementara itu Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Moazzam Malik menyatakan keberhasilan sejak tahun 1990 pemerintah Inggris mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 42 persen.

"Di saat yang sama ekonomi negeri kami tumbuh sebesar 72 persen. Ini merupakan pencapaian ekonomi tercepat diantara negara anggota G-20 sejak tahun 2000. Saya berharap Indonesia dengan nota kesepahaman ini dapat mendukung tujuan pembangunan Indonesia berkelanjutan, makmur dan sejahtera," pungkas Moazzam Malik. (mharun).

Portofolio DfID Indonesia Capai 60 Juta Pound Sterling dalam Bisnis.com pada 3/7/2019

Pemerintah menyatakan kerjasama dengan Pemerintah Inggris melalui Department for International Development dan Foreign and Commonwealth Office dengan total portofolio senilai 60 juta pound sterling untuk membiayai kegiatan di bidang kehutanan, pertanian, dan pemerintahan.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menyatakan kerjasama dengan Pemerintah Inggris melalui Department for International Development dan Foreign and Commonwealth Office dengan total portofolio senilai 60 juta pound sterling untuk membiayai kegiatan di bidang kehutanan, pertanian, dan pemerintahan.

Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro menyatakan kerjasama dengan Department for International Development (DfID) dan Foreign and Commonwealth Office bergerak untuk mendorong Pembangunan Rendah Karbon (PRK) dan perubahan iklim. Kerjasama yang dimulai pada 18 Juni lalu bertujuan mempercepat proses administrasi dan hukum.

"Ke depan, saya berharap kita dapat mengembangkan lebih banyak proyek kerjasama untuk mendukung Strategi Nasional tentang Inisiatif PRK," jelas Bambang dalam Pertemuan dengan *Secretary of State for International Development* Mr. Rory Stewart, dalam rangkaian Indonesia *Infrastructure Investment Forum* (IIIF) 2019 di London, Selasa (2/7/2019).

Bambang menjabarkan saat ini Bappenas tengah mengimplementasikan tiga proyek kerjasama dengan DfID. Pertama, Tata Kelola Hutan dan Lahan Gambut (TEGAK) yang dikelola oleh Indonesia Climate Change Trust Fund

(ICCTF). Proyek ini untuk mendukung Badan Restorasi Gambut (BRG) Indonesia dalam mengelola hutan, restorasi, serta mencegah kebakaran hutan di lima provinsi.

Kedua, Pembangunan Rendah Karbon (PRK) yang bertujuan untuk mendukung persiapan perencanaan PRK serta mengintegrasikan PRK ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Ketiga, Hutan Berkelanjutan di Papua yang dikelola oleh Desk Papua. Proyek ini untuk mendukung pencegahan deforestasi dan degradasi lahan di wilayah Papua.

Adapun total portofolio DfID di Indonesia sebesar 60 juta pound sterling. Rincian pembiayaan kegiatan antara lain di bidang *Forest, Lands and Governance* (FLAG) sebesar 32,5 juta, pound sterling serta 27,5 juta pound sterling untuk mendukung perencanaan spasial dan hutan berkelanjutan di Papua, pertumbuhan ekonomi hijau, dan PRK.

Kegiatan DfID di Indonesia dikelola oleh UK Climate Change Unit (UKCCU) yang didirikan sejak 2011. Menurut Bambang, koordinasi yang erat dan kuat antara UKCCU dan Bappenas sangat penting untuk memastikan sinergi di antara semua program dan pemangku kepentingan.

"Saya berharap DfID melalui UKCCU tetap memberikan dukungan pembiayaan melalui berbagai *delivery model*, baik melalui pemerintah maupun pelaksanaan langsung oleh organisasi internasional, untuk memastikan efektivitas mencapai tujuan pada tingkat maksimum serta pada saat yang sama juga dapat meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan selain pemerintah," pungkasnya.





ICCTF Sekretariat

Lippo Kuningan, Lt. 15,
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-12,
Jakarta 12940, Indonesia
P +62 (21) 8067 9314
F +62 (21) 8067 9315
E sekretariat@icctf.or.id
W www.icctf.or.id



ICCTF_ID



icctfofficial



ICCTF



Indonesia Climate Change Trust Fund